

DIRGAHAYU
REPUBLIK INDONESIA



77

PULIH
LEBIH CEPAT
BANGKIT
LEBIH KUAT



DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



NEWSLETTER

infoHUBDAT

Berpikir Jernih Membangun Transportasi Darat

EDISI TRIWULAN 02 / 2022

INFO KHUSUS

**Stiker Pemantul
Cahaya untuk
Angkutan
Barang**

**MUDIK AMAN
MUDIK SEHAT**



Segenap keluarga besar
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
mengucapkan selamat dan sukses atas
pelantikan **Bapak Drs. Hendro Sugiatno, M.M.**
sebagai **Direktur Jenderal Perhubungan Darat**
Kementerian Perhubungan.

Semoga senantiasa
diberikan kesehatan
dan kemudahan
dalam menjalankan
tugas jabatannya.

Menteri Perhubungan Budi
Karya Sumadi melantik Irjen.
Pol. Drs. Hendro Sugiatno,
M.M sebagai Direktur
Jenderal Perhubungan Darat
pada hari Kamis, 30 Juni
2022 di Ruang Mataram,
Kantor Pusat Kementerian
Perhubungan, Jakarta.

Menhub berharap, Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya yang
dilantik bisa memenuhi
target organisasi, serta
mengawal keberhasilan
program kerja, tidak saja di
lingkup Kemenhub tetapi
juga mendukung Indonesia
Maju sebagai visi misi
Presiden.



Semenjak dilantik pada 3 November 2017,
Bapak Drs. Budi Setiyadi, S.H., M.Si.
melaksanakan tugasnya sebagai Direktur
Jenderal Perhubungan Darat selama 4 tahun 6
bulan. Selama periode tersebut, telah banyak
dihasilkan sejumlah pengembangan dan
terobosan yang dilakukannya di Direktorat
Jenderal Perhubungan Darat.

Sebuah kehormatan bagi
keluarga besar Direktorat
Jenderal Perhubungan
Darat dapat bertugas dan
dipimpin oleh Bapak Budi
Setiyadi. Kiranya semangat
kerja dan nilai-nilai positif
yang selama ini
ditunjukkan dapat menjadi
teladan bagi seluruh
personel di lingkungan
Direktorat Jenderal
Perhubungan Darat.
Terimakasih Bapak
Budi Setiyadi. Salam
hormat dan tetap
semangat.



Assalamualaikum Wr.Wb.

Apa kabar pembaca setia *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman? Bersua kembali dalam *Newsletter* infoHUBDAT sebagai media untuk bersilaturahmi dan berbagi informasi. Teriring salam hangat dan doa kepada pembaca sekalian semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Ada beberapa hal yang menjadi catatan saya, dengan harapan dapat menjadi motivasi kita bersama dalam memberikan pelayanan jasa transportasi darat kepada masyarakat.

Pembaca yang budiman, seiring dengan situasi pandemi di Indonesia yang berangsur membaik, sudah semakin banyak masyarakat yang mendapatkan vaksinasi, bahkan kini sudah vaksin *booster*, pemerintah memutuskan untuk memberikan kelonggaran persyaratan perjalanan di semua moda transportasi. Namun demikian hal ini jangan membuat kita abai terhadap perilaku hidup sehat dan protokol kesehatan yang telah kita jalani pada masa pandemi ini.

Pada triwulan kedua tahun 2022 ini, kita telah sukses menyelenggarakan Angkutan Lebaran 1443 H. Setelah 2 tahun masyarakat tidak mudik karena pandemi, tahun ini masyarakat bisa mudik ke kampung halaman masing-masing. Kebijakan ini disambut dengan sangat antusias oleh masyarakat. Memang terjadi lonjakan-lonjakan jumlah penumpang pada jalur mudik dan di simpul-simpul transportasi saat mudik lebaran kemarin. Namun dengan persiapan sarana dan prasarana transportasi yang baik serta sinergi yang erat dengan para pemangku kepentingan, maka hajat besar Angkutan Lebaran Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik.

Pembaca sekalian, pada triwulan kedua ini pula Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengalami pergantian pucuk pimpinan. Bapak Budi Setiyadi yang telah purna tugas digantikan oleh Bapak Hendro Sugiatno. Kepada Bapak Budi Setiyadi saya ucapkan menjalankan tugas dan amanah baru, sebuah kehormatan dapat bekerja dan dipimpin oleh Bapak. Kemudian, dengan telah dilantiknnya Bapak Hendro Sugiatno sebagai Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang baru, maka tanggung jawab saya sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Perhubungan Darat juga telah usai.

Akhir kata, saya sampaikan imbauan untuk selalu menjaga kebersihan dan menerapkan protokol kesehatan, baik diri pribadi maupun lingkungan sekitar. Bagi rekan-rekan yang harus bertugas di lapangan, saya sampaikan apresiasi dan terimakasih. Inilah saatnya kita membuktikan bahwa eksistensi kita berguna bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara tercinta. Tetap semangat dan tetap sehat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Pelaksana Tugas,

Ir. CUCU MULYANA, D.E.S.S.





Foto Cover:
HMS DJPD/CAS

Seorang ibu dengan raut wajah gembira sambil menggendong anak kecil menjelang keberangkatan bus Balik Rantau di Terminal Mangkang, Semarang, Jawa Tengah, 7 Mei 2022. Pemerintah mengadakan mudik dan balik gratis untuk meringankan beban mobilitas masyarakat.

PENANGGUNG JAWAB
Marta Hardisawono

REDAKTUR PELAKSANA
Endy Irawan

REDAKTUR UTAMA
Pitra Setiawan
Nanang Rahardjo
Aznal

REDAKTUR
Ardian Sukmaji
Dinda Siahaan
Alvia Lilian
Hanna Suryadika

DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI
M. Aulia Dharma
Herman Wibowo
Bayu Adi Saputro
Rinjani Pangestu

SEKRETARIAT
Bejo Sri Wahono
Ratna Syaka Aprilida
Sari Hayu Hutami
Ely Rusnita
Yudha Kurniawan
Kurniadi Zaini
Didik Prasetyo
Rifai Dyan Armananta
Nolita
Rusdinal
M. Farid Ardiansyah
M. Fadil Imaddudin
Achmad Maulana
Achmad Nanang
Rosmala Damayanti
Nova Yulianasari Sopiah
Reza Saputra
Nurfadilah Sinta Ningrum
Ade Yunita
Ardianto
Rina Noviana
Septriana Dia Areta

KONTRIBUTOR
Junedi Sembiring
Nurita Aprilianing Tyas
Marisa
Wahyu Arya Putra
Prisca Magdalena Samosir
Arief Eko Sumba
Cristian Andri Mardhani
Erlieka Affan
Ririn Scorviyanti
Rinto Mahendra Raharjo



Diterbitkan oleh:

Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Gedung Karya Lantai 12
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. : (021) 3506141

email : humas.hubdat@gmail.com

website : <http://hubdat.dephub.go.id/>

@hubdat151

ditjen perhubungan darat

@ditjen_hubdat

ditjen perhubungan darat

Info Redaksi

Pembaca *Newsletter* infoHUBDAT yang budiman,

Seiring dengan situasi pandemi yang berangsur membaik, pemerintah membuat kebijakan membolehkan masyarakat untuk dapat melaksanakan kegiatan mudik lebaran dengan persyaratan, bagi yang telah mendapatkan vaksin booster, tidak perlu lagi melakukan tes antigen atau PCR, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

Para pembaca yang budiman, pada edisi kali ini, *Newsletter* infoHUBDAT menyuguhkan Laporan Utama mengenai evaluasi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1433 H yang dinilai baik oleh sejumlah kalangan. Beberapa artikel kami siapkan untuk mendukung laporan utama, antara lain: Apresiasi Tim Sukses Angkutan Lebaran 2022; Analisis dan Evaluasi Angkutan Lebaran 2022; Mengurai Kepadatan Arus Mudik dan Balik (tulisan pengamat transportasi Djoko Setijowarno); dan Mudik Gratis Ringankan Beban Mobilitas Masyarakat.

Kemudian, kami sajikan pula Tips Memilih Bus yang Aman dengan Aplikasi Spionam. Menyusul berikutnya artikel mengenai peluncuran angkutan *feeder Light Rail Transit* di Palembang dengan nama "New Oplet Musi Emas".

Tak kalah menarik, artikel mengenai Konversi Kendaraan Listrik dan Kendaraan Kustomisasi; serta Stiker Pemantul Cahaya Untuk Kendaraan Angkutan Barang. Tulisan berisi tips dan trik mengendalikan sepeda motor *matic* di turunan curam dengan judul "Waspada Motor *Matic* di Jalan Menurun" juga kami sajikan kepada pembaca sekalian.

Kami tampilkan pula laporan kunjungan kerja Menteri Perhubungan meninjau Terminal Giwangan Yogyakarta dalam sebuah artikel bertajuk Terminal Giwangan Yogyakarta Segera Direvitalisasi. Masih bertema prasarana transportasi jalan, kami suguhkan artikel mengenai Mal Pelayanan Publik di Terminal Cilacap.

Selain itu, ada pula ulasan mengenai peresmian Tiga Pelabuhan Penyeberangan dan Satu Unit Kapal di Wakatobi oleh Presiden RI Joko Widodo turut melengkapi edisi kali ini.

Berbagai kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pun telah kami himpun dan kami sajikan kepada pembaca sekalian dalam infoSelintas. Di bagian akhir, kami sajikan rekaman gambar peristiwa dan kegiatan unit kerja terkait melalui bidikan lensa. Semoga apa yang kami sajikan ini dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan para pembaca sekalian. (*)



daftar isi

EDISI TRIWULAN 02 / 2022

Info Utama

04 ARUS MUDIK DAN BALIK DINILAI BAIK

Kegiatan arus mudik dan balik angkutan lebaran tahun 2022 telah dilalui. Kemenhub berkomitmen penuh untuk menjalankan amanah Presiden Joko Widodo, agar pelaksanaan mudik ini berjalan dengan aman dan sehat, serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi masyarakat.

06 Apresiasi Tim Sukses Angkutan Lebaran 2022

08 Analisis & Evaluasi Angkutan Lebaran 2022

14 Mengurai Kepadatan Arus Mudik dan Balik

16 Mudik Gratis Ringankan Beban Mobilitas Masyarakat

Info Angkutan

17 Memilih Bus Yang Aman Dengan Aplikasi Spionam

18 Angkutan Feeder LRT dan BRT Sumsel

Info Sarana

20 Konversi Kendaraan Listrik dan Kendaraan Kustomisasi

22 Stiker Pemantul Cahaya Untuk Angkutan Barang

24 Budayakan Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini

26 Waspada Motor Matic di Jalan Menurun

28 Mobil Listrik Untuk Taksi

Info Prasarana

29 Keberadaan Terminal Barang Internasional Entikong

31 Mal Pelayanan Publik di Terminal Cilacap

32 Terminal Giwangan Yogyakarta Segera Direvitalisasi

Info TSDP

35 Presiden Resmikan Tiga Pelabuhan Penyeberangan dan Satu Unit Kapal di Wakatobi

Info Kesehatan

36 Menjadi Aparatur Sipil Negara yang "Cerdik"

Info Selintas

- 37**
- Wujudkan Zona Integritas, Dirjen Hubdat Minta Tingkatkan Komitmen dan Kinerja
 - Dirjen Hubdat Tinjau Progres Perbaikan Jembatan Ngaglik I Lamongan yang Ambles
 - Menhub Ajak Manfaatkan Usia Emas Anak untuk Pendidikan Berlalu Lintas yang Baik
 - Layani Lintas Dompok-Matak-Penagi, Ditjen Perhubungan Darat Hadirkan KMP. Bahtera Nusantara 03 untuk Masyarakat Kepri
 - Siaga Bantu Pemudik Ditjen Hubdat Sediakan Mobil Patroli Pelayanan Masyarakat Gratis
 - Cegah Kecelakaan, Ditjen Hubdat Tingkatkan Pengawasan Angkutan Pariwisata

Lensa Hubdat

- 41**
- Rekaman Berbagai Peristiwa yang Terjadi di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Melalui Bidikan Lensa

Arus Mudik dan Balik Dinilai Baik

Kegiatan arus mudik dan balik lebaran tahun 2022 yang dimulai pada 25 April 2022 (H-7) sampai dengan 9 Mei 2022 (H+5) telah dilalui. Kemenhub berkomitmen penuh untuk menjalankan amanah Presiden Joko Widodo, agar pelaksanaan mudik ini berjalan dengan aman dan sehat, serta memberikan kebahagiaan dan kegembiraan bagi masyarakat.

Berbagai masukan telah kami terima dan alhamdulillah pada umumnya menyampaikan bahwa mudik pada tahun ini berjalan dengan baik. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Senin (9/5).

Menhub mengungkapkan, mudik tahun ini berbeda dengan mudik sebelumnya, dimana masyarakat sudah dua tahun tidak mudik karena pandemi. Hal itu ditunjukkan dengan hasil survey yang mengekspresikan animo masyarakat yang tinggi yaitu sebanyak 85,5 juta masyarakat yang ingin mudik. "Hal itu merupakan kabar gembira sekaligus tantangan bagi semua stakeholder untuk dapat melayani dengan baik," ujarnya.

Sejumlah survei, simulasi, diskusi, telah dilakukan secara sistematis sehingga menghasilkan rekomendasi yang dieksekusi oleh para penanggung jawab di lapangan. "Yang paling masif adalah rekan-rekan Kepolisian di jalur darat, dan kemudian di penyeberangan, udara, kereta api dan laut," ucapnya.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, mudik tahun ini menghasilkan satu pergerakan yang sangat banyak, yang berakibat pelayanan yang diberikan belum maksimal. "Oleh karenanya kami sampaikan permohonan maaf belum bisa



Menteri Perhubungan memimpin Rapat Koordinasi di Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2022, Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 2/5/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

memenuhi harapan semua pihak. Kami akan lakukan evaluasi agar kegiatan mudik dan juga kegiatan dimana akan ada pergerakan yang masif di masa yang akan datang, dapat diantisipasi dengan lebih baik," tuturnya.

Menhub berharap, kegiatan mudik tahun ini menjadi awal dari kebangkitan ekonomi dan juga menjadi tanda dimulainya masa endemi. "Kami selalu menekankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan baik, sehingga diharapkan tidak terjadi kenaikan kasus usai masa mudik," ujarnya.

Menhub menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kolaborasi dan komunikasi yang

baik, yang telah dilakukan antar Kementerian/Lembaga, Polri, operator sarana dan prasarana transportasi dan unsur terkait lainnya.

Menhub juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan dari media massa atas dukungannya membantu mengkomunikasikan dan menyebarluaskan semua kebijakan mudik kepada masyarakat, sehingga dapat diketahui, dimengerti dan dijalankan. "Kami juga sampaikan terima kasih kepada para pemudik yang telah mengikuti berbagai imbauan dari pemerintah," ucap Menhub.



Selanjutnya, Menhub juga menyampaikan apresiasi kepada K/L, Pemerintah Daerah, BUMN, dan pihak Swasta yang telah menyediakan program mudik gratis, dalam upaya mengurangi angka pemudik sepeda motor dan menekan angka kecelakaan.

Angka Kecelakaan Menurun, Kendaraan Pribadi Terbukti Mendominasi Pergerakan Mudik

Pada penyelenggaraan mudik tahun ini, sesuai hasil survei potensi pemudik, kendaraan pribadi mendominasi pergerakan mudik. Di sisi lain, angka kecelakaan lalu lintas mengalami penurunan yang signifikan.

Demikian dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Selasa (10/5), saat menutup kegiatan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2022 di Kantor Kemenhub, Jakarta.

Tercatat, jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang keluar Jabodetabek pada Lebaran 2022 mengalami peningkatan sebanyak 1.7% dibandingkan dengan Lebaran 2019. Sedangkan, jumlah yang masuk Jabodetabek

mengalami peningkatan sebanyak 11.8% dibandingkan dengan Lebaran 2019. "Riset kami bahwa kendaraan pribadi mendominasi sekitar 47 persen dari total pergerakan memang terbukti dan pergerakannya ada di waktu-waktu tertentu. Jadi ini harus dikelola dengan baik," ujar Menhub.

Meskipun penggunaan kendaraan pribadi meningkat, Menhub menjelaskan, terjadi penurunan angka kecelakaan lalu lintas sebesar 45%, berdasarkan data dari Polri.

"Penurunan kecelakaan lalin diikuti juga dengan penurunan pemudik pengguna sepeda motor. Saya menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah mengikuti anjuran pemerintah untuk tidak mudik menggunakan sepeda motor, karena sangat beresiko," kata Menhub.

Sementara itu, untuk pengguna angkutan umum, Menhub menyampaikan jumlahnya relatif sama dengan tahun sebelum pandemi. Bahkan terjadi lonjakan di hari-hari tertentu, yang belum pernah terjadi sebelumnya selama pandemi.

Selain itu, Menhub juga menuturkan, penerapan protokol kesehatan telah dijalankan dengan baik di simpul-simpul transportasi, guna mencegah terjadinya kenaikan kasus Covid-19 usai masa mudik. "Untuk di darat, kami lebih banyak memberikan kesadaran kepada masyarakat yang mudik untuk vaksin booster dan kami sediakan fasilitasnya di titik-titik tertentu," ucap Menhub.

Menhub meminta jajarannya bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk melakukan analisis dan evaluasi penyelenggaraan mudik tahun ini, dan membuat perbaikan dan terobosan di penyelenggaraan mudik tahun selanjutnya.

Selanjutnya, Menhub menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjalankan kinerja yang baik dalam pengelolaan mudik. "Bahkan Bapak Presiden memberikan atensi yang besar, termasuk memberi arahan untuk melakukan relaksasi berkaitan dengan kepulangan para pemudik setelah tanggal 8 Mei 2022," kata Menhub. (*)

Apresiasi Tim Sukses Angkutan Lebaran 2022

Penanganan arus mudik dan balik tahun 2022 dinilai banyak pihak telah berjalan dengan aman dan sehat. Untuk itu, Kementerian Perhubungan memberikan penghargaan kepada berbagai pihak, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kolaborasi yang baik selama penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2022.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada Senin (27/6), menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah pihak, baik dari unsur Kementerian/Lembaga (K/L), operator transportasi dan pendukung (BUMN/Swasta), asosiasi, media, dan masyarakat.

“Saya atas nama pribadi dan lembaga, menyampaikan terima kasih atas dukungan yang baik dan kolaborasi yang cair dengan semua pihak yang mendukung kelancaran penyelenggaraan mudik tahun ini,” ujar Menhub.

Menhub mengungkapkan, arahan Presiden yang membolehkan masyarakat untuk mudik pada tahun ini harus dijalankan dengan baik. “Tugas ini tidak mudah, tanpa kolaborasi yang baik tidak mungkin dapat berjalan. Memang ada satu catatan yang harus kita evaluasi agar penyelenggaraan mudik tahun depan bisa lebih baik lagi,” tuturnya.

Menhub menginginkan, kolaborasi dan kebersamaan dalam penanganan mudik yang baik

pada tahun ini, dapat kembali diterapkan dipenyelenggaraan mudik tahun depan. “Alhamdulillah hasilnya tingkat kecelakaan mudik pada tahun ini menurun. Ini menunjukkan kesadaran masyarakat untuk melakukan mudik dengan aman dan sehat sudah cukup baik. Ini berkat kerja sama kita semua dalam mengkomunikasikan dan menyosialisasikan kebijakan-kebijakan mudik,” ucapnya.



Penyerahan penghargaan kepada Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia

Sejumlah pemangku kepentingan yang mendapatkan penghargaan diantaranya: dari unsur K/L yakni: Kemenko PMK, KemenPUPR, Korlantas Polri, Kemenkes, Kominfo, Basarnas, BMKG, dan KNKT.

Kemudian, dari unsur operator BUMN dan Swasta yakni: Jasa Marga, Pertamina, ASDP Indonesia Ferry, AP I, AP II, Pelindo, Pelni, Garuda Indonesia, KAI, Airnav Indonesia, Rapi, Astra, PT Sinar Jaya Megah Langgeng, PT Lion Mentari Airlines, PT Dharma Lautan Utama, dan Hutama Karya.

Selanjutnya diberikan pula penghargaan kepada sejumlah media nasional baik cetak, *online* maupun televisi, seperti: Kompas, Media Group, MNC Group, Trans Group, Emtek Group, Antara, TVOne, Republika, Bisnis Indonesia, SWA, dan sejumlah media lainnya.

Kinerja penanganan mudik pada tahun ini mendapat penilaian positif dari sejumlah pihak baik dari Presiden, DPR, dan masyarakat.

Berdasarkan beberapa hasil survei juga menunjukkan respon positif. Diantaranya yaitu: hasil survei yang diselenggarakan SMRC dimana



Malam Apresiasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2022 (1443 H) di Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 27 Juni 2022. Kemenhub memberikan penghargaan kepada berbagai pihak, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan dan kolaborasi yang baik selama penyelenggaraan Angkutan Lebaran tahun 2022.



Penyerahan penghargaan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan



Penyerahan penghargaan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

terdapat 76,4% masyarakat puas atas kinerja pemerintah dalam mengelola angkutan lebaran tahun 2022 ini. Selain itu data juga menunjukkan bahwa selama masa angkutan lebaran ini, angka kecelakaan lalu lintas turun sebesar 45 % dibandingkan tahun 2019.

Selanjutnya, hasil survei dari Kompas juga menunjukkan

tingkat kepuasan publik yang cukup tinggi terhadap kinerja pemerintah untuk menyiapkan mudik lebaran. Misalnya yakni: untuk transportasi pribadi (66,8% responden menyatakan puas), untuk transportasi umum (74,2% responden). Sebanyak 65,5% responden juga menyatakan bahwa penanganan mudik tahun ini lebih baik daripada tahun 2019 sebelum pandemi.

Turut hadir dalam kegiatan yang disiarkan secara *live streaming* melalui kanal Youtube Kemenhub151, Sekretaris Jenderal Novie Riyanto Raharjo, Inspektur Jenderal Gede Pasek Suardika, Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Plt. Dirjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Firman Santyabudi dan sejumlah pimpinan K/L, BUMN dan Pemimpin Redaksi Media Massa.(*)



Terdapat perbedaan situasi antara Angkutan Lebaran tahun 2022 dibandingkan dengan Angkutan Lebaran 2020 dan Angkutan Lebaran 2021 yang lalu, bahkan jika dibandingkan dengan Angkutan Lebaran sebelum pandemi di tahun 2019. Pandemi yang sudah dua tahun mererpa kehidupan dunia dan tidak hanya memporak-porandakan kehidupan perekonomian, juga mendisrupsi tradisi kehidupan keagamaan. Secara khusus bagi umat muslim, pandemi mendisrupsi salah satu tradisi terbesarnya yakni, mudik untuk berlebaran. Di tahun 2022 ini, seiring dengan menurunnya kasus Covid-19 dan juga meningkatnya jumlah masyarakat yang sudah di vaksin, Pemerintah membuat kebijakan membolehkan masyarakat untuk kembali melaksanakan kegiatan mudik lebaran dengan persyaratan, masyarakat yang sudah vaksin booster, tidak perlu lagi melakukan tes kesehatan antigen atau PCR, namun tetap menerapkan

MUDIK AMAN MUDIK SEHAT Analisis & Evaluasi Angkutan Lebaran 2022

Indikator keberhasilan penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2022 dapat dilihat dari kelancaran lalu lintas arus mudik dan balik, ketertiban dalam bertransportasi (terutama bagi sepeda motor), dan menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas, terutama yang membawa korban jiwa meninggal dunia (Instran, 2022).

kan protokol kesehatan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oleh karena itu penanganan masalah pergerakan Angkutan lebaran tahun 2022 diantisipasi sebelum pelaksanaannya agar pola perjalanan dimasa Angkutan lebaran 2022 berjalan dengan lancar. Lebaran tahun

2022 cukup disambut dengan antusias oleh masyarakat Indonesia karena ditahun ini pemerintah secara resmi membolehkan untuk melakukan perjalanan mudik lebaran setelah dua tahun larangan mudik akibat wabah Covid-19. Pemerintah memprediksi akan terjadi potensi lonjakan penum-

MUDIK AMAN MUDIK SEHAT

pang yang tinggi pada jalur-jalur mobilitas dan simpul transportasi saat mudik Lebaran tahun 2022. Fenomena ini membuat pemerintah mempersiapkan seluruh sarana dan prasarana bagi pendukung kelancaran arus mudik maupun balik pada Angkutan lebaran 2022. Kendati kendaraan pribadi jalur darat menjadi favorit, moda transportasi umum massal tetap disiapkan mulai dari bus, pelayaran, pesawat, kapal laut, kereta api perkotaan dan antarkota. Kementerian Perhubungan juga telah melakukan persiapan dengan memastikan keberlangsungan layanan angkutan lebaran dan menyiapkan cadangan sarana angkutan masing-masing moda.

Kebijakan Transportasi

Beberapa regulasi Angleb 2022 telah di terapkan seperti regulasi perjalanan dalam negeri, di mana para pemudik akan diperiksa kelengkapan syarat-syaratnya saat melakukan perjalanan mudik

sesuai dengan SE Satgas Covid-19 No.16.2022 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam negeri di Masa Pandemi. Kebijakan transportasi darat menjadi yang paling krusial karena selain harus melakukan manajemen pengaturan angkutan umum juga harus melakukan pengaturan terhadap kendaraan pribadi baik mobil maupun motor. Adapun pemberlakuan pembatasan kendaraan operasional jalan tersebut diberlakukan pada 28 April-1 Mei 2022 dan 6-9 Mei 2022. Hal ini mengacu kepada potensi pergerakan arus mudik maupun arus balik yang cukup besar. Pada kebijakan transportasi di jalan Tol untuk pemudik yang telah menerima vaksin dosis ketiga atau booster tidak perlu melakukan testing antigen atau PCR, sedangkan pemudik yang telah menerima vaksin dosis kedua wajib menyerahkan bukti testing antigen 1x24 jam, atau PCR 3x24 jam. Selain itu pemudik yang baru menerima vaksin dosis pertama wajib menyerahkan bukti

testing PCR 3x24 jam dan wajib menerapkan protokol kesehatan 3M secara ketat. Selanjutnya untuk kebijakan transportasi di jalan arteri untuk pengendalian lalu lintas di jalan non tol, pemerintah telah melakukan tindakan antisipatif dengan kebijakan rekayasa lalu lintas sesuai dengan situasi di lapangan. Apabila terjadi peningkatan arus lalu lintas serta menimbulkan kepadatan akibat limpahan dari gerbang tol maka dilakukan langkah dilapangan sesuai diskresi kepolisian. Sektor darat menjadi yang paling krusial untuk ditangani. Sekitar 47 persen dari 85,5 juta orang yang diprediksi akan melakukan mudik akan menggunakan jalur darat, baik kendaraan pribadi (mobil dan sepeda motor) maupun angkutan darat (bus, angkutan penyeberangan, dan lain-lain).

Bagi kebijakan transportasi ASDP telah diprediksi akan ada lonjakan yang signifikan pada periode mudik 2022. Kebijakan yang diambil untuk ASDP adalah untuk meningkatkan pelayanan dan aspek keselamatan perjalanan pengguna jasa ferry, ASDP dengan melakukan pengetatan persyaratan menyeberang. ASDP hanya menerima e-ticket Ferizy berisi data lengkap sesuai Kartu Identitas dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), serta dokumen Vaksin dan hasil negatif Antigen/PCR yang valid, ditunjukkan melalui Aplikasi Peduli Lindungi. Selanjutnya untuk kebijakan transportasi perkeretaapian, laut dan udara juga dengan syarat perjalanan yang ketat.

Analisis dan Evaluasi Pengendalian Angkutan Jalan

Secara keseluruhan jika dibandingkan dengan Lebaran Tahun 2019, maka pada Lebaran Tahun 2022 semua moda angkutan mengalami penurunan. Penurunan secara keseluruhan sebesar -0.20% yaitu sebesar 13.041.678 orang. Penurunan yang sangat signifikan terlihat pada moda ang-



Menteri Perhubungan melepas pemberangkatan Balik Bareng di Terminal Mangkang, Semarang, Jawa Tengah, 7 Mei 2022. Foto: HMS DJPD/CAS

kutan jalan sebesar -33.98%. Jika dilihat pada *trend* yang terjadi di angkutan jalan puncak mudik melalui angkutan jalan terjadi di H-2 sebesar 185.821 penumpang, dan mulai terjadi penurunan di H-1 dan titik terendah pergerakan penumpang angkutan jalan terjadi di H1 Lebaran. Hal ini mengingat operasional bus (termasuk mudik gratis dengan bus) juga terjadi pada H-3 sampai H-1. Sedangkan titik tertinggi arus balik sebesar 282.020 penumpang terjadi di H+5. Hal ini di amati berlanjut sehingga >H+7 yang telah ditetapkan sebagai waktu monitoring angkutan lebaran, hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah memperpanjang waktu cuti/WFH bagi ASN dan swasta juga mengikutinya langkah ini.

Terdapat catatan bahwa pemerintah telah sigap dengan membuat sejumlah mitigasi dan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan saat arus mudik yang disempurnakan pada fenomena yang berbeda pada arus balik. Selain itu hingga 10 Mei 2022 masih terdapat 32% pemudik atau 740.883 kendaraan belum kembali ke asal. Hal itu terjadi, di antaranya, akibat kebijakan pemerintah terkait perpanjangan waktu libur untuk anak sekolah. Selain diberlakukannya WFH untuk ASN, dan juga banyak yang menunda perjalanan dikarenakan terdapat hari libur nasional. Terdapat juga preferensi moda transportasi yang digunakan masyarakat pada mudik Lebaran 2022, jenis kendaraan yang paling banyak digunakan oleh pemudik yaitu sepeda motor. Meskipun demikian, terdapat penurunan jumlah pengguna sepeda motor dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 35%.

Analisis dan Evaluasi Angkutan Penyeberangan

Perbandingan total jumlah penumpang Angkutan penyeberangan Lebaran 2022 dibandingkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 9.68% atau mendekati



Foto udara kendaraan pemudik memadati Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten (29/4/2022). Foto: Liputan6/Angga Yuniar

10%, namun jika dibandingkan dengan jumlah penumpang pada seluruh moda, angkutan penyeberangan merupakan yang tertinggi, hal ini disebabkan infrastruktur tol Trans Sumatera yang semakin membaik. Fenomena puncak arus mudik (H-2) dan arus balik (H+4) terjadi berkaitan dengan periode awal libur lebaran dan berakhirnya masa libur lebaran. Pelaksanaan arus balik relatif lebih terkendali dikarenakan faktor antisipasi dalam penanganan kendaraan dengan metode *buffer zone* atau *delay system* dimana *rest area* aktif sebagai penampungan kendaraan (dilakukan juga pengecekan kelengkapan keberangkatan seperti tiket dll. Selain itu faktor relaksasi WFH dan perpanjangan libur sekolah mempengaruhi kelancaran arus balik di Pelabuhan bakauheni). Ada tren peningkatan kendaraan pribadi sebesar 5%, dan peningkatan truk sebesar 30%.

Kondisi pada Pelabuhan penyeberangan lain seperti Gilimanuk-Ketapang relatif terkendali dan lancar. Beberapa catatan kebijakan di lapangan untuk penanganan arus balik seperti di Ketapang, Banyuwangi sangat kondusif melalui koordinasi aktif seluruh *stakeholder*, hingga pemanfaatan lokasi *check point* dan alur yang

rapi, sehingga arus kendaraan dan penumpang meski ramai tapi tetap mengalir lancar.

Analisis dan Evaluasi Kendaraan pada Jalan Tol

Data jumlah kendaraan yang keluar Jabodetabek melalui 4 gerbang utama dari periode H-7 s.d H+7 tahun 2022 terlihat bahwa terdapat kenaikan sebesar 3.0% sedangkan kendaraan yang masuk Jabodetabek mengalami juga kenaikan sebesar 12.7% Penambahan jumlah infrastruktur jalan tol di trans Jawa terbukti meningkatkan mobilitas masyarakat khususnya di jalan tol. Ini terlihat dari data pergerakan kendaraan pribadi di jalan tol yang meningkat dibandingkan tahun lalu 2019. Memaksimalkan pelayanan kepada pengguna jalan tol jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 H, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menurunkan sejumlah tim Satuan Tugas (Satgas) di seluruh jalan tol milik Jasa Marga Group. Tim Satgas Jasa Marga Siaga akan memastikan kesiapan pelayanan operasi gerbang tol, *rest area*, dan sepanjang jalur tol.

Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan secara keseluruhan pengendalian di jalan tol tetap terkendali. Jasa Marga menurunkan Unit operasional ini terdiri dari 146 kendaraan derek, 121 ken-



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi keterangan pers usai melakukan pantauan arus mudik di Gerbang Tol Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, 1/5/2022. Foto: HMS DJPD/CAS

daraan *Mobile Customer Service* (MCS), 53 kendaraan *ambulance*, 37 kendaraan *rescue*, 3 kendaraan multiguna, 107 kendaraan Patroli Jalan Raya (PJR). Titik-titik pemantauan/posyan angkutan lebaran 2022 selama masa mudik di Jalan Tol Jasa Marga Group adalah Pintu Tol Cikampek Utama, Kalihurip Utama, Cikupa dan Ciawi. Kesiapan jalan tol dan non-tol. Jalan tol ada 53 ruas beroperasi, 2.500 km dioperasikan. Sepanjang 1.670 km ada di Jawa, 700 km di Sumatera, 100 km di Kalimantan, 40 km di Sulawesi, 10 km ada di Bali. Sedangkan panjang jalan nasional (non tol) di Indonesia adalah 47.017 km dengan kemantapan 91,8%, yang tersebar di wilayah Pulau Sumatera sepanjang 7.918 km, Pulau Jawa & Bali sepanjang 5.348 km, Pulau Kalimantan sepanjang 6.556 km, Pulau Sulawesi sepanjang 8.785 km dan Pulau Maluku - Papua sepanjang 18.410 km.

Selain jalan tol, Kementerian PUPR juga menyiapkan prasarana di tiap *rest area* tipe A sepanjang jalur mudik dengan menambahkan jumlah toilet *portable* sebanyak 100 unit. *Rest area* tipe A adalah area peristirahatan di jalur tol yang dilengkapi dengan SPBU,

sementara *rest area* tipe B tidak terdapat SPBU.

Kebijakan pelayanan kepada pengguna jalan tol melalui Posko Siaga Layanan Lebaran 2022 di sejumlah *rest area* jalan tol Jasa Marga Group di nilai sangat efektif. Jasa marga juga mengeluarkan kebijakan upaya antisipasi kepadatan lalu lintas, di antaranya mengoptimalkan kapasitas lajur dan memastikan bahu jalan bersih dari gangguan kendaraan serta menangani lokasi rawan kepadatan yang telah diidentifikasi di sejumlah ruas jalan tol Jasa Marga Group. Selain itu juga telah menghentikan sementara pekerjaan konstruksi yang berdampak pada kelancaran arus lalu lintas di jalan tol sesuai dengan instruksi dari BPJT. Kelancaran perjalanan mudik di jalan tol tergantung pada tiga hal, pertama adalah prasarana infrastruktur yang tersedia, kedua

regulasi/manajemen lalu lintas, ketiga adalah perilaku pengguna prasarana atau pemudik. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyiapkan Jalan Lintas Pantai Selatan (Pansela) Jawa sebagai jalur alternatif para pemudik tahun 2022 selain Lintas Pantai Utara (Pantura) dan Lintas Tengah Pulau Jawa. Secara umum, jumlah kendaraan di jalan tol di periode mudik lebaran 2022 mengalami kemiripan dengan 2019. Namun, tahun 2022 terdapat kecenderungan penurunan jumlah kendaraan sebesar 7.3% yang keluar jabodetabek di GT Merak. Tetapi sebaliknya saat arus mudik yang masuk ke Jabodetabek mengalami peningkatan 3.1%. Untuk GT Kalikangkung baik arus mudik dan arus balik sama-sama mengalami peningkatan dibanding 2019 yaitu 4.2% yang keluar dan 2.3% yang masuk.

Kelancaran perjalanan mudik di jalan tol tergantung pada tiga hal, pertama adalah prasarana infrastruktur yang tersedia, kedua regulasi/manajemen lalu lintas, ketiga adalah perilaku pengguna prasarana atau pemudik.

Analisis dan Evaluasi Kendaraan pada Jalan Non Tol

Secara umum, jumlah kendaraan di jalan non-tol diperiode mudik lebaran 2022 didominasi sepeda motor dibandingkan kendaraan pribadi mobil baik yang keluar mau pun masuk jalan arteri/non-tol.

Dari data, jumlah pemotor menjadi dominan, banyak yang mudik menggunakan sepeda motor karena keadaan ekonomi selama dua tahun pandemi dan sebagian memang akan tinggal seterusnya di kampung halaman. Para pemudik yang menggunakan sepeda motor memadati jalur mudik di sepanjang jalan arteri Kabupaten Karawang, Jawa Barat hingga ke jalur Pantura wilayah Cirebon.

Analisis dan Evaluasi Titik Simpul Terpadat

Untuk angkutan jalan baik penumpang berangkat dan bus berangkat, terdapat kepadatan di simpul Terminal Kertonegoro, Ngawi, yang merupakan terminal penumpang tipe A dengan luas 5 hektar yang terletak di Jalan Suryo, Desa Grudo, Ngawi. Terminal ini terletak di poros Jalan Nasional Ngawi - Mantingan. Terminal ini melayani angkutan pedesaan, angkutan antarkota dalam provinsi/AKDP dan angkutan antarkota antar provinsi/AKAP. Data yang diperoleh dari Terminal Kertonegoro mencatat kalau peningkatan penumpang pada tanggal 5 Mei 2022 mencapai 193% dibandingkan penumpang di hari biasa yang di kisaran 8.000 penumpang. Mengantisipasi kenaikan bus datang, terminal ini tidak hanya mengadakan armada tambahan tapi memastikan juga seluruh armada laik jalan. Untuk angkutan TSDP baik penumpang maupun trip, terdapat kepadatan di simpul Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Gilimanuk-Ketapang. Berbagai dinamika di lapangan telah terjadi, saat arus



Penumpang bersiap naik bus di area Terminal Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Kampung Rambutan, Jakarta, Sabtu (30/4/2022). Hingga tiga hari jelang Lebaran 2022 (H-3), 1.191 orang pemudik tercatat meninggalkan Terminal Kampung Rambutan. Foto: Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

mudik terjadi kepadatan antrean kendaraan yang relatif tinggi saat menuju Pelabuhan Merak, Banten. *Lessons learned* yang didapatkan saat arus mudik adalah belum optimalnya proses *screening* pengguna jasa di luar pelabuhan yang dilakukan bersama-sama dengan para *stakeholders* pendukung terkait yang berdampak terhadap adanya pemudik yang belum bertiket tiba di pelabuhan. Pada layanan arus balik Lebaran tahun ini khususnya di dua simpul terpadat ini, ASDP bersama dengan *stakeholders* terkait meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan melakukan strategi. Pertama melakukan implementasi melalui skema *delaying system (screening)* di lima *rest area* Jalan Tol dan tiga Rumah Makan di Jalur arteri atau nasional. Kedua yaitu optimalisasi proses *screening* dengan pengguna jasa yang belum bertiket disaring dan diedukasi oleh petugas pelayanan Ferizy di delapan titik *buffer zone*.

Analisis dan Evaluasi Kecelakaan Kejadian kecelakaan pada mudik Lebaran tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar 45 persen dibandingkan tahun 2019 yaitu dari 3.199 kasus menjadi 1.763 kasus. Adapun Kecelakaan lalu lintas Lebaran 2022 ini didominasi di jalur arteri. Fatalitas ikut menurun drastis di angka 72% (MD). Keberhasilan ini, setidaknya

ada 2 hal krusial yang menyebabkan angka kecelakaan pada mudik Lebaran tahun ini menurun drastis. Pertama, menurunnya jumlah pemudik yang menggunakan motor. Kedua, berkurangnya angka kecelakaan juga disebabkan oleh menurunnya penggunaan angkutan wisata seperti bus untuk melayani penumpang mudik. Bus angkutan wisata merupakan bus bekas antarkota antarprovinsi (AKAP) yang digunakan secara individual. Oleh karenanya, sopir bus kerap tak terlacak. Terkadang juga tidak diketahui apakah bus yang digunakan dalam kondisi baik atau tidak.

Analisis dan Evaluasi Mudik Gratis

Program mudik gratis tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi kemacetan lalu lintas dan membuat masyarakat lebih aman dan nyaman. Evaluasi angkutan lebaran 2022 menunjukkan bahwa program mudik gratis yang dilaksanakan Kemenhub cukup berhasil dan membantu masyarakat menengah ke bawah untuk merasakan euforia mudik Lebaran. Dari data menunjukkan program ini berhasil dalam pendaftaran 100% kuota, tetap dalam realisasi masih terdapat yang tidak hadir di saat keberangkatan. Tingkat okupansi angkutan umum sebesar 96.2% jauh lebih baik dari mudik gratis

sepeda motor yang hanya 78.5%. Pemerintah kedepannya perlu mengantisipasi hal ini melihat kapasitas yang terbatas pada mudik gratis 2022.

Rekomendasi

Preferensi dari jalur mudik yang digunakan, jumlah kendaraan yang menggunakan jalur utara lebih besar, 60% dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang menggunakan jalur selatan yang hanya sebesar 40% dari total volume lalu lintas sehingga terkait jalan non tol di jalur pantai selatan (pansela), perlu direkomendasikan penggunaan jalur selatan. Jalur tersebut sebagai sebuah alternatif yang bagus bagi para pemudik sehingga sarana dan prasarana pendukung pada jalur tersebut harus mulai dipersiapkan dengan baik agar dapat digunakan pada mudik Lebaran mendatang.

Terkait jalan tol maupun non-tol direkomendasikan penyempurnaan manajemen rekayasa lalu lintas, mulai dari manajemen ganjil-genap, *one way*, *contraflow* di jalan tol maupun di non-tol sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan dan juga tersedianya *rest area* yang representatif dan mencukupi jumlahnya.

Terkait ASDP direkomendasikan menambah kapasitas penampungan kendaraan menuju pelabuhan penyeberangan, memangkas waktu antre kendaraan untuk naik ke angkutan penyeberangan, menambah jumlah kapal penyeberangan, hingga perluasan dermaga yang padat.

Terkait perbaikan fasilitas dan sarana serta prasarana pendukung harus dilakukan di bandara, terminal, pelabuhan, hingga stasiun. Selain itu, penambahan kapasitas angkutan kereta api saat mudik dan pelaksanaan mudik gratis secara maksimal. Terkait *rest area* masih menjadi momok kemacetan lalu lintas pada masa mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Rekomendasi yang dapat dilakukan untuk

lebaran masa mendatang adalah perlunya pemisahan antara zona parkir dan zona aktivitas dalam *rest area*, supaya arus kendaraan di dalam *rest area* lebih lancar.

Terkait keselamatan lalu lintas, masih terdapat rendahnya kedisiplinan pemudik seperti dalam kesimpulan diatas, direkomendasikan penindakan dari aparat hukum karena kejadian di lapangan konsentrasi petugas semata-mata terfokus pada kelancaran arus mudik dan arus balik. Kampanye keselamatan berlalu lintas, khususnya saat musim mudik, harus lebih intensif lagi. Sosialisasi mudik yang dilakukan lebih awal dengan cara mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum dengan memberikan tawaran yang lebih baik.

Terkait rendahnya penggunaan angkutan umum untuk mudik lebaran, perlu dibuat kebijakan insentif untuk pengguna angkutan umum selain rekayasa lalu lintas seperti jalur khusus *contraflow* untuk angkutan umum (mudik dan balik).

Selain itu, untuk mempercepat implementasi *multi-lane free flow* (MLFF) menggunakan dan memanfaatkan teknologi sistem transportasi cerdas (berbasis IT) pada pintu tol sehingga bisa mengurangi antrean di pintu tol. Harapan ke depan, mudik dapat berlangsung dengan penggunaan energi bersih (penggunaan bus listrik dan kendaraan listrik). Pemerintah juga perlu mempersiapkan kebijakan angkutan lebaran 2023 lebih awal dengan melihat semua potensi yang akan memberikan dampak pada pola perjalanan mudik tahun depan dengan beberapa perencanaan rekomendasi kebijakan berdasarkan prediksi situasi di tahun 2023, seperti dampak implementasi kereta api cepat Jakarta-Bandung, penambahan ruas jalan tol trans Jawa dan Sumatera, penerapan sistem jalan tol tanpa henti, Penerapan teknologi arterial ITS dan juga beberapa penerapan terobosan angkutan di masa depan.(*)

(Sumber: Laporan Akhir Anev Angkutan Lebaran 2022, Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub)



Rekayasa buka tutup rest area diberlakukan secara situasional jika terjadi kepadatan di rest area. Foto: Media Indonesia

Mengurai Kepadatan Arus Mudik dan Balik

Tata kelola atau manajemen prioritas, waktu dan pemberian informasi terkini mutlak dilakukan untuk memperlancar saat arus mudik dan balik lebaran. Volume kendaraan arus mudik dan balik tidak jauh berbeda, namun durasi arus balik lebih lama ketimbang arus mudik. Arus mudik lebih melandai, ditambah lagi ada tradisi lebaran ketupat di pantai utara Jawa dan peregrangan masuk kerja dan sekolah.

Pada saat arus mudik, pemerintah terlalu fokus pada pengaturan atau rekayasa lalu lintas di jalan tol. Sesuai prediksi hasil survey Badan Litbang Perhubungan (Maret 2022), pilihan jalur yang dilalui Tol Trans Jawa 24,1 persen. Sementara memilih jalur intas Tengah Jawa 9,7 persen, Tol Cipularang 9,2 persen, jalur lintas pantai utara (pantura) Jawa 82, persen dan Trans Sumatera (non tol) 4,7 persen.

Upaya manajemen prioritas dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan di jalan Tol Trans Jawa berupa ganjil genap, arus searah (*one way*) dan arus berlawanan arah (*contra flow*) sudah maksimal. Sebelum terhubung jalan Tol Trans Sumatera, waktu perjalanan di kala mudik untuk mencapai wilayah perbatasan Jatim-Jateng kisaran 30 -35 jam. Sekarang, setelah terhubung lama perjalanan kisaran 12 - 15 jam. Rekayasa lalu lintas di jalan arteri secara penuh, seperti pantura

sulit untuk dilakukan. Jadi wajar durasi lama perjalanan saat mudik sulit dikendalikan.

Kemacetan di saat mudik dan balik lebaran tidak bisa dihindari, namun yang terpenting, kemacetan tersebut dapat dikendalikan. Tidak sampai kendaraan berhenti total di jalan, tetap jalan dalam kecepatan rendah. Memang melelahkan bagi pengemudi yang tidak menyiapkan diri secara prima.

Jika lelah beristirahatlah, jika mengantuk tidurlah.

Rest area masih menjadi momok kemacetan lalu lintas masa arus mudik dan balik lebaran. Pemisahan zona parkir dan zona aktivitas perlu dilakukan, supaya arus kendaraan di dalam *rest area* lebih lancar. Penyebab lain kemacetan lalu lintas di jalan tol, seperti perilaku beristirahat di bahu jalan tol, berkendara zig zag, saldo uang elektronik tidak

mencukupi, penyempitan ruas jalan (*bottleneck*), melintas jalur tanpa kendali petugas Polisi Lalu Lintas, kecelakaan lalu lintas. Di sisi lain, berdasarkan data PT Jasa Raharja, jumlah kecelakaan lalu lintas tahun 2022 menurun dibandingkan tahun 2019. Pada periode 25 April 2022 sampai 5 Mei 2022 tercatat ada 4.107 kecelakaan lalu lintas dan 568 korban meninggal dunia. Periode yang sama di tahun 2019 terdata 4.083 kecelakaan lalu lintas dan 824 orang meninggal dunia. Dengan kata lain, jumlah kasus kecelakaan lalu lintas menurun 28 persen. Kasus kecelakaan yang menelan korban jiwa turun 49 persen.

Kedisiplinan dan ketaatan pemudik pada aturan lalu lintas masih rendah. Itu semua tergambar begitu jelas baik di sepanjang jalan tol maupun arteri. Masih ada pengendara yang didorong faktor

kelelahan menggunakan bahu jalan untuk beristirahat, mobil barang (jenis *pick up*) digunakan untuk mengangkut orang, dan sepeda motor dinaiki lebih dari dua orang. Ada juga pengemudi yang kemudian viral di media sosial karena melintas median jalan tanpa sepengetahuan petugas saat *one way* diberlakukan.

Ironisnya, tidak ada penindakan dari aparat hukum karena konsentrasi petugas semata-mata terfokus pada kelancaran arus mudik dan arus balik. Tentunya, fenomena pelanggaran-pelanggaran lalu lintas itu sangat mengancam keselamatan dan dapat membahayakan orang lain. Kampanye keselamatan berlalu lintas, khususnya saat musim mudik, harus lebih intensif lagi.

Penyeberangan ke Sumatera
Semakin panjang jalan tol Trans Sumatera, akan semakin memantik pemudik ke Sumatera

menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi berombongan, Faktor keamanan di Pulau Sumatera menjadi pertimbangan pemudik menyeberang melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak saat malam hari dan tiba di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni pagi dan selanjutnya dapat melanjutkan perjalanan dengan aman.

Upaya yang dapat dilakukan adalah menjamin keamanan pemudik di Pulau Sumatera, keamanan *rest area* di sepanjang Tol Jakarta - Merak, sosialisasi sistem tiket daring (*online*) harus lebih masif lagi, program mudik gratis perlu diperbanyak dan diperluas hingga Pulau Sumatera, pemisahan angkutan logistik dan penumpang di saat mudik dan balik lebaran, perluasan areal parkir kendaraan bermotor di Pelabuhan Merak, praktek percaloan tiket harus segera dilenyapkan agar pemudik merasa lebih nyaman.

Manajemen waktu dan mudik gratis

Menambah kapasitas jalan di Pulau Jawa tidak mungkin dilakukan terus menerus. Selain keterbatasan lahan juga keterbatasan anggaran. Pengaturan waktu mobilisasi mudik dan balik harus dimulai dan sudah dimulai saat arus balik lebaran tahun ini.

Untuk mengurai kepadatan saat puncak arus mudik dan balik dapat dilakukan dengan memperpanjang masa libur sekolah dan kuliah, menerapkan sistem bekerja dari rumah (*work from home*).

Untuk menghindari kursi kosong mudik gratis, diperlukan koordinasi antar pengelola mudik gratis. Pendaftaran mudik gratis cukup satu jaringan (*link*) namun bisa beda kelola dan waktu pemberangkatan. Pemberangkatan dari terminal sekaligus mengedukasi masyarakat.(*)

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat



Foto tampak atas situasi Gerbang Tol Kalikangkung, 5/5/2022. Foto: HMS DJPD/WBW



Pelepasan keberangkatan bus Mudik Gratis di Terminal Jatijajar, Depok, 28/4/2022. Foto: HMS DJPD/WBW

Kementerian Perhubungan memberangkatkan sebanyak total 20.580 peserta program mudik gratis menggunakan bus dan 1.920 sepeda motor diangkut dengan truk. Program ini dilakukan untuk mengurangi angka kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan juga mengurangi kepadatan di jalan.

Pada Kamis (28/4), Menko PMK Muhadjir Effendy didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melepas keberangkatan sebanyak 3.180 peserta Mudik Gratis yang diangkut dengan 106 bus di Terminal Jatijajar, Depok.

Menko PMK Muhadjir Effendy mengapresiasi upaya yang dilakukan Kemenhub berserta instansi terkait yang menyelenggarakan mudik gratis agar terwujud Mudik Aman Mudik Sehat sesuai arahan Presiden RI.

Pada kesempatan yang sama, Menhub mengimbau kepada perusahaan swasta untuk memfasilitasi kegiatan mudik gratis bagi karyawannya melalui program Corporate Social Responsibility/

Mudik Gratis Ringankan Beban Mobilitas Masyarakat

CSR. “Harapannya program ini juga ikut memberikan kebahagiaan bagi karyawan yang ingin mudik,” ujar Menhub.

Lebih lanjut Menhub mengatakan, meminta kepada para perusahaan bus untuk membantu menambah bus-busnya untuk meningkatkan kapasitas angkut dari program mudik gratis yang diselenggarakan baik oleh BUMN, maupun pihak swasta.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat menyediakan sarana mudik gratis dari Jakarta ke 22 kota tujuan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Sumatera sebanyak 686 unit bus.

Selain di Terminal Jatijajar, para peserta mudik gratis Kemenhub dengan moda bus akan diberangkatkan dari Terminal Poris Plawad Tangerang, Terminal Baranangsiang Bogor, Terminal Kampung Rambutan Jakarta, dan Terminal Pulo Gebang Jakarta tanggal 28-29 April 2022.

Pelepasan mudik gratis ini turut dihadiri Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi, Walikota Depok Mohammad Idris, Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Direksi Jasa Raharja, Direktur Kesehatan Masyarakat Kemenkes, dan segenap Forkompida Kota Depok.(*)



MEMILIH BUS YANG AMAN DENGAN APLIKASI SPIONAM

Dalam SPIONAM dapat diperiksa keabsahan angkutan barang, angkutan orang dalam trayek, maupun angkutan orang tidak dalam trayek apakah kendaraan tersebut telah terdaftar atau tidak.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi menegaskan masyarakat perlu lebih jeli lagi dalam memilih angkutan untuk keperluan mudik. Menurutnya memasuki masa Angkutan Lebaran 2022 ini pihaknya telah menyediakan portal SPIONAM untuk mempermudah masyarakat mengecek secara mandiri validitas angkutan umum yang akan digunakan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memeriksa kendaraan yang akan digunakan apakah sudah terdaftar atau belum. Untuk memeriksa ini disediakan Sistem Perizinan Online Angkutan dan Multimoda atau SPIONAM,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setyadi pada Rabu (06/04).

Dirjen Budi menyampaikan bahwa pihaknya menginformasikan kehadiran SPIONAM ini sebagai bentuk edukasi kepada

masyarakat sekaligus untuk mencegah maraknya angkutan ilegal yang beroperasi menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Belakangan juga sering terjadi kecelakaan bus pariwisata. Oleh karena itu sebelum memilih jenis angkutan ataupun PO nya diharapkan masyarakat dapat memeriksa kendaraan tersebut di SPIONAM karena nantinya akan menyangkut keselamatan dan keamanan pengguna bus. Dalam SPIONAM tersebut dicantumkan kapan masa berlaku uji kendarannya, juga masa berlaku kartu pengawasannya,” jelas Dirjen Budi.

Dalam SPIONAM dapat diperiksa keabsahan angkutan barang, angkutan orang dalam trayek, maupun angkutan orang tidak dalam trayek apakah kendaraan tersebut telah terdaftar atau tidak. Caranya dengan menuju laman situs <http://spionam.dephub.go.id/>. Kemudian pilih menu cek kendaraan dan

MUDIK AMAN MUDIK SEHAT

masukkan nomor polisi kendaraan yang akan diperiksa. Atau dapat juga memilih menu cek perusahaan dengan memasukkan nama perusahaan bus yang akan dicek.

“Jika nopol kendaraan ataupun nama PO nya tidak ditemukan hasilnya maka kendaraan tersebut tidak memiliki izin atau belum terdaftar di kami. Maka sebaiknya untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, dianjurkan bagi calon pengguna kendaraan umum untuk memilih armada lain yang sudah terdaftar,” urai Dirjen Budi.

Ia juga menjelaskan kini pihaknya tengah memperketat pengawasan terhadap angkutan ilegal maupun bus pariwisata gelap yang beroperasi. “Saya akan berkoordinasi dengan Dinas-Dinas Perhubungan di Kabupaten dan Kota maupun Kepolisian untuk bersama meningkatkan pengawasan terhadap angkutan ilegal maupun calo yang marak menawarkan jasanya untuk menjebak calon penumpang,” tambah Dirjen Budi.

Selain itu ia juga mengimbau bagi pengusaha bus AKAP dan Pariwisata selain meningkatkan faktor keselamatan dalam berkendara, juga diminta untuk menyediakan *hand sanitizer* di dalam bus sebagai upaya mencegah penularan Covid-19 selama perjalanan.

“Setiap penumpang yang masuk juga diimbau untuk memiliki aplikasi PeduliLindungi yang terupdate agar selalu sejalan dengan regulasi perjalanan yang ditetapkan Pemerintah. Saya juga minta agar para pengemudi bus yang membawa kendaraan supaya dipilih yang benar-benar mengetahui jalur beserta tantangan rute yang dilewatinya sehingga sudah hafal jalur dan tidak lagi menggunakan *maps*,” pungkas Dirjen Budi.(*)

Angkutan Feeder LRT dan BRT Sumsel

Angkutan Umum di Palembang Semakin Lengkap dan Terintegrasi

Upaya meningkatkan minat masyarakat untuk naik angkutan massal tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Butuh kolaborasi pentahelix yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pebisnis, komunitas masyarakat, dan juga media.

Kementerian Perhubungan meluncurkan layanan angkutan *feeder* berupa angkutan kota (angkot), sebagai angkutan pengumpan *Light Rapid Transit* (LRT) dan *Bus Rapid Transit* (BRT) Sumsel di Palembang. Kehadiran angkot yang diberi nama “New Oplet Musi Emas” ini membuat layanan angkutan umum di kota Palembang semakin lengkap dan terintegrasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, pada Sabtu (11/6), menyerahkan secara simbolis berupa kunci angkot *feeder* kepada Gubernur Sumsel Herman Deru dan Walikota Palembang Harnojoyo. Pada tahap awal, Kemenhub menyerahkan sebanyak 29 unit angkot *feeder* kepada Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang.

Di awal operasionalnya, layanan *feeder* ini akan melayani dua rute, yakni: rute pertama yaitu lintas Talang Kelapa - Talang Buruk via Asrama Haji dengan panjang rute 20,4 Km. Rute kedua yaitu lintas Asrama Haji - Sematang Borang via jalan Noerdin Panji dengan panjang rute 40.2 Km. Ke

depannya, layanan rute *feeder* akan terus ditambah.

“Kita terus sosialisasikan penggunaan angkutan umum agar kehadirannya bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Naiklah angkutan umum agar Palembang tidak macet dan udara menjadi lebih bersih,” ujarnya.

Tingkat keterisian BRT Trans Musi sudah mencapai 55 persen lebih setelah dilakukan penataan dan *rerouting* rute angkutan umum di Palembang.

Menhub menjelaskan, upaya meningkatkan minat masyarakat untuk naik angkutan massal



Menhub Budi Karya Sumadi bersama Gubernur Sumsel Herman Deru sedang mencoba layanan integrasi LRT Palembang dalam acara launching feeder LRT Musi Emas di Griya Agung Palembang, Sabtu (11/6) Foto: abp/Urban Id



Feeder LRT atau oplet yang siap melayani masyarakat kota Palembang pengguna LRT. Sejumlah pengemudi berdiri berjajar di samping Angkutan Feeder LRT “New Oplet Musi Emas” di Palembang, 11 Juni 2022. Foto: detiksumsel.com

tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Butuh kolaborasi pentahelix yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, pebisnis, komunitas masyarakat, dan juga media.

“Maka dari itu, hari ini saya di Palembang bersama Pak Gubernur, Walikota dan sejumlah tokoh masyarakat Sumsel, ingin menyampaikan pesan dengan lebih luas dan masif kepada masyarakat Palembang, untuk sama-sama memanfaatkan angkutan umum yang sudah disediakan,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumsel Herman Deru mendukung penuh langkah Kemenhub untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan umum di kota Palembang dan sekitarnya. “Kita berharap makin banyak lagi masyarakat Palembang dan sekitarnya yang menggunakan angkutan umum,” katanya. Pada bulan Maret lalu, Kemenhub telah

mencanangkan Gerakan Nasional Kembali Ke Angkutan Umum yang dilaksanakan di kota Palembang. Kota Palembang menjadi contoh atau *role model* transportasi yang lengkap dan terintegrasi di Indonesia, karena memiliki angkutan umum yang lengkap, mulai dari BRT, LRT, angkot, sampai ke angkutan sungai yang saling terhubung.

Berdasarkan data, angka pengguna LRT Sumsel kian meningkat. Pada tahun ini hingga Mei 2022, penumpang LRT Sumsel telah mencapai 350 ribu penumpang. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan dengan masa pandemi yang mencapai 150 ribu penumpang. Begitupun dengan tingkat keterisian BRT Trans Musi sudah mencapai 55 persen lebih setelah dilakukan penataan dan *rerouting* rute angkutan umum di Palembang.

Selain mengurangi kemacetan dan polusi udara, kehadiran angkutan

umum juga menambah lapangan pekerjaan. Penyediaan angkot feeder di Palembang sekaligus juga merekrut sebanyak 60 orang pengemudi.

Pada kegiatan peluncuran angkutan *feeder* hari ini, Kemenhub berkolaborasi dengan sejumlah tokoh dan publik figur asal Sumsel, diantaranya yakni: Helmi Yahya (tokoh publik), Rizal Armada (musisi), Jialica Maharani (anggota DPD), dan Aquina (pengusaha). Diharapkan, keterlibatan para tokoh asal Sumsel semakin memperluas ajakan penggunaan angkutan umum di Palembang dan sekitarnya.

Turut hadir Dirjen Perkeretaapian Zulfikri, Staf Utama Bidang Perhubungan Darat dan Konektivitas Budi Setiyadi, Anggota DPR RI Eddy Santana Putra, dan Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Suharto.(*)

Kementerian Perhubungan c.q Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar Uji Publik Rancangan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2022 mengenai Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Kendaraan Bermotor Berbasis Baterai dan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan (RPM) tentang Kendaraan Bermotor Dengan Kustomisasi.

“Dalam rangka mewujudkan kualitas udara bersih, ramah lingkungan, serta komitmen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca maka itu perlu dorongan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan melalui sebuah peraturan perundang-undangan,” kata Endy Irawan, Kepala Bagian Hukum dan Humas di Hotel HARRIS Sentul City, Bogor pada Selasa (19/4).

Berkenaan dengan hal ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mengatur penyelenggaraan konversi, bengkel konversi, pemeriksaan kelaikan komponen konversi, pengujian fisik kendaraan konversi, serta sertifikasi, dan dokumen konversi.

Dalam uji publik ini dibahas komponen konversi kendaraan bermotor konversi selain sepeda motor yakni:

1. Motor listrik (memenuhi persyaratan keselamatan);
2. Komponen baterai (sertifikat SNI atau SI);
3. Sistem baterai manajemen



Kendaraan bermesin BBM yang dikonversi menjadi kendaraan listrik

KONVERSI KENDARAAN LISTRIK DAN KENDARAAN KUSTOMISASI

- (memenuhi persyaratan keselamatan);
- 4. Penurunan tegangan arus searah (DC to DC converter);
- 5. Controller/Inverter (Aktuator dan kontraktor);
- 6. Inlet pengisian baterai (memenuhi persyaratan keselamatan);
- 7. Sistem elektrikal pendukung peralatan pendukung lainnya.

Selain itu untuk kategori kendaraan bermotor konversi selain sepeda motor meliputi M1, M2 (Bus), M3, N1, N2, dan N3 (Mobil barang) serta diharuskan bengkel umum yang akan melakukan konversi dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan bagi yang dinyatakan telah

memenuhi persyaratan sebagai bengkel konversi akan diberikan sertifikat bengkel konversi yang dimuat dalam laman Kementerian Perhubungan dan informasinya akan diperbarui secara berkala.

Endy pun berharap rancangan peraturan Menteri Perhubungan yang dimaksud diharapkan dapat menjadi pedoman untuk mendorong penguasaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan ekspor kendaraan bermotor.

KENDARAAN KUSTOMISASI

Di samping itu, pada kesempatan yang sama Endy mengungkapkan bahwa saat ini ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor



Kabag Hukum dan Humas, Endy Irawan membuka kegiatan uji publik

penyelamat perekonomian dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 yang juga menjadi faktor penting dalam pertumbuhan UMKM.

“Ekonomi kreatif yang saat ini berkembang, salah satunya berasal dari dunia otomotif berupa produksi kendaraan kustom. Melihat para modifikator kendaraan kustom yang termasuk dalam sektor UMKM membutuhkan prosedur/pedoman legalitas yang jelas dalam melakukan modifikasi kendaraan bermotor (kendaraan kustom) sehingga kendaraan dapat dioperasikan di jalan.

“Diharapkan dengan adanya pedoman legalitas yang jelas dapat memberikan kepastian terhadap setiap kendaraan kustom di Indonesia agar dapat bersaing di dunia internasional serta menjamin keselamatan penggunaan kendaraan kustom,” jelas Endy.

Adapun dalam paparan yang dijelaskan Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor, Dewanto terdapat jenis kendaraan dengan kustomisasi di antaranya:

1. Sepeda motor untuk kendaraan khusus bagi mobilitas penyandang cacat (dilengkapi roda 3);
2. Mobil penumpang;
3. Mobil bus yang dilakukan pada bus tunggal sumbu

- max 1.2;
4. Mobil barang dengan JBB maksimal 5500 kg yang hanya dapat dilakukan untuk mobil barang bak muatan terbuka atau tertutup menjadi campervan dan;
5. Kendaraan khusus.

“Dengan keterangan yang melaksanakan pengujian dan menerbitkan resume uji yang akan diterbitkan maksimal 7 hari yakni Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Unit Pelaksana Pengujian Swasta Terakreditasi, atau Unit Pelaksana Penimbangan

Kendaraan Bermotor (UPPKB) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten/Kota terakreditasi,” terang Dewanto.

Dalam susunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kendaraan Bermotor Dengan Kustomisasi mengatur persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor dengan kustomisasi, pembuatan atau perakitan kendaraan kustomisasi, dan pengujian tipe fisik kendaraan bermotor dengan kustomisasi.

Di akhir sambutannya, Endy mengatakan, “Mengingat pentingnya pelaksanaan RPM tentang Konversi Kendaraan Bermotor Selain Sepeda Motor Dengan Penggerak Motor Bakar Menjadi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai serta RPM tentang Kendaraan Bermotor Dengan Kustomisasi ini, saya mengajak kepada seluruh stakeholder terkait agar dapat mendukung demi terciptanya regulasi yang tepat dan memberikan manfaat untuk kemajuan sektor transportasi di Indonesia,” pungkas Endy. (*)



Mobil kustom dari ICS yang dipamerkan di IIMS Hybrid 2021. Foto: Bangkit Jaya Putra/kumparan

Penggunaan Stiker Pemantul Cahaya telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor. Tata Cara Pemasangan dan Spesifikasi stikernya juga telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Namun penerapannya di lapangan masih belum memenuhi harapan kita. Untuk itulah kegiatan-kegiatan sosialisasi semacam ini perlu terus dilakukan dan terus ditingkatkan efektifitasnya. Demikian disampaikan Direktur Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat, Kemenhub, Danto Restyawan, ketika membuka secara virtual kegiatan Sosialisasi Keselamatan Jalan 2022. Kegiatan yang bertema “Peningkatan Keselamatan Angkutan barang Melalui Pemakaian Stiker Pemantul Cahaya yang Benar” ini diselenggarakan di Kota Banda Aceh (30/5).

Keselamatan transportasi jalan merupakan isu utama yang perlu ditangani secara lebih baik. Data dari Polri menyebutkan jumlah kecelakaan di Indonesia per tahun masih cukup tinggi, yaitu sebesar 100 ribu-an dengan jumlah kematian masih di angka 25 ribu-an. Ini artinya setiap jam ada sekitar 3 nyawa melayang akibat kecelakaan di jalanan kita.

Danto melanjutkan, “Berbagai kejadian kecelakaan yang merenggut banyak korban terjadi susul menyusul akhir-akhir ini, terutama yang melibatkan bus dan truk, di mana hal ini menimbulkan kerugian yang cukup besar.” Menurutnya kecelakaan tabrak belakang dan tabrak samping merupakan salah satu kecelakaan yang sering terjadi. “Penyebabnya adalah karena jarak pandang pengemudi terhadap kendaraan di depannya tidak terlalu jelas dikarenakan keadaan



Menhub Budi Karya Sumadi memasang stiker pemantul cahaya di badan truk. Foto: BKIP

STIKER PEMANTUL CAHAYA UNTUK ANGKUTAN BARANG

Penggunaan stiker pemantul cahaya yang benar, baik spesifikasi teknis maupun tata cara pemasangannya, akan mampu mengurangi risiko kecelakaan tabrak belakang yang saat ini masih banyak terjadi, khususnya pada malam hari.

lingkungan yang gelap atau kurang pencahayaan. Atau akibat beda kecepatan (*speed gap*) yang besar, lebih dari 30 km/jam,” imbuhnya. Danto beranggapan salah satu cara untuk menurunkan angka kecelakaan tersebut yaitu dengan pemasangan Stiker Pemantul Cahaya (APC Tambahan).

Dikatakan oleh Danto, “Penggunaan stiker pemantul cahaya yang benar, baik spesifikasi teknis maupun tata cara pemasangannya, akan mampu mengurangi risiko

kecelakaan tabrak belakang yang saat ini masih banyak terjadi, khususnya pada malam hari.”

Penyelenggaraan Kegiatan Sosialisasi Keselamatan Jalan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pentingnya penggunaan stiker pemantul cahaya sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perlengkapan Keselamatan Kendaraan Bermotor serta Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Teknis Alat Pemantul Cahaya Tambahan pada Kendaraan Bermotor, Kereta



Sosialisasi “Peningkatan Keselamatan Angkutan barang Melalui Pemakaian Stiker Pemantul Cahaya yang Benar” di Hermes Hotel Banda Aceh, 30 Mei 2022.

Gandengan, dan Kereta Tempelan, dimana Alat Pemantul Cahaya Tambahan atau Stiker Pemantul Cahaya telah menjadi salah satu persyaratan teknis yang wajib dipenuhi kendaraan wajib uji berkala jenis mobil barang.

Beberapa materi yang disampaikan pada kegiatan ini antara lain: Peraturan mengenai Alat Pemantul Cahaya Tambahan yang dibawa oleh Joko Kusnanto, dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan; Spesifikasi Teknis Stiker Pemantul Cahaya oleh Ogik Giarno, dari PT. 3M Indonesia; Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, yang dibawa oleh Heri Prabowo, dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan; serta Kunjungan Lapangan dan Praktik

perwakilan dari Dinas Perhubungan Provinsi Aceh, Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, BPTD Wilayah I Provinsi Aceh, dan Perusahaan Angkutan Barang di wilayah Provinsi Aceh. Di samping itu hadir pula sebanyak ±500 orang peserta secara virtual melalui Zoom Meeting dari Dinas Perhubungan Provinsi/Kab/Kota, Kepala BPLJSKB dan BPTD di seluruh Indonesia, perusahaan angkutan umum di seluruh Indonesia. Kegiatan di Kota Banda Aceh ini merupakan awal dari rangkaian Sosialisasi Keselamatan Jalan yang dilaksanakan di beberapa provinsi yang lain, kerja sama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan PT. 3M Indonesia. (*)

Pemasangan Stiker Pemantul Cahaya, yang dilaksanakan di Terminal Barang Santan Banda Aceh. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 50 orang peserta yang hadir secara fisik yang merupakan

Logo Alat Pemantul Cahaya

a. Logo Perusahaan Pembuat Alat pemantul Cahaya berupa Stiker **harus** memiliki **Logo Perusahaan pembuat**

b. Logo E-Mark Alat pemantul Cahaya berupa Stiker **harus** memiliki **Logo E-Mark** sebagai berikut:

LOGO E-MARK

- Kode kelas material
- Penandaan Eropcean Test Institute
- Nomor Persetujuan/sertifikat dari perusahaan pembuat APC

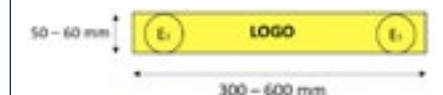
c. Penempelan Logo Perusahaan Pembuat dan Logo E-Mark

Logo E-mark dan Logo Perusahaan pembuat tercantum pada interval 500 (lima ratus milimeter) atau kurang, untuk masing-masing E-mark atau Logo

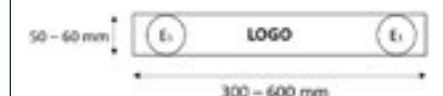
Warna, Ukuran & Logo Alat Pemantul Cahaya



Keterangan : APC berupa stiker pada bagian belakang kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan berwarna **merah**



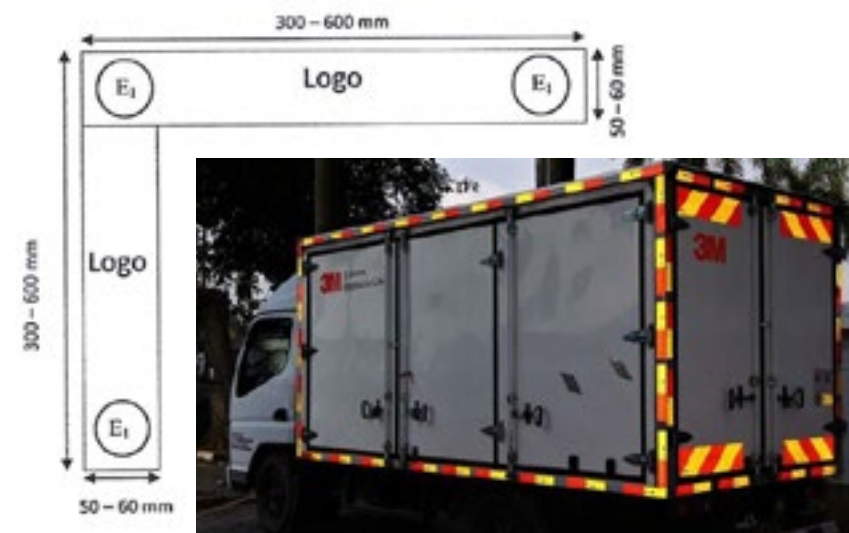
Keterangan : APC berupa stiker pada bagian samping kendaraan bermotor, berwarna **kuning**



Keterangan : APC berupa stiker pada bagian samping kendaraan bermotor, berwarna **putih**

Note: Penetapan warna APC pada samping kendaraan menyesuaikan bagian dari tangki/gandengan/bak kendaraan angkut agar terlihat jelas dan tidak samar

Bentuk Pemasangan APC Berupa Stiker Pada Sudut Kendaraan Bermotor



Budayakan Tertib Lalu Lintas Sejak Usia Dini

Dengan format yang menyenangkan, kita berikan edukasi yang membuat mereka senang, seperti menggambar zebra cross, lampu, dan rambu lalu lintas, dan lain sebagainya.

Kementerian Perhubungan menggandeng institusi pendidikan untuk turut menanamkan budaya tertib berlalu lintas kepada masyarakat sejak usia dini. Pada Senin, (23/5) Kemenhub berkolaborasi dengan Universitas Gadjah

Mada untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi keselamatan berkendara/safety riding.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kolaborasi dengan institusi pendidikan atau sekolah-sekolah mulai dari tingkat

dasar sampai jenjang perguruan tinggi sangat penting dilakukan, agar hasilnya lebih optimal. "Kami tidak mungkin melakukan upaya ini sendiri, kita harus sama-sama berkolaborasi untuk mendidik anak-anak dan masyarakat kita, agar memiliki kesadaran berlalu lintas yang baik," ujar Menhub.

Menurut Menhub, pendidikan berlalu lintas yang baik perlu ditanamkan sejak usia dini, agar lebih membekas dan diingat sepanjang hidup mereka. "Dengan format yang menyenangkan, kita berikan edukasi yang membuat mereka senang, seperti menggambar zebra cross, lampu, dan rambu lalu lintas, dan lain sebagainya," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor UGM Panut Mulyono mengatakan, mendukung inisiasi



1. Menhub, Dirjen Hubdat dan Rektor UGM berfoto bersama anak-anak pemenang Lomba Mewarnai untuk TK dan kelas 1 SD
2. Safety Riding di area kampus UGM
3. Menhub meninjau pameran kendaraan listrik karya mahasiswa UGM

yang dilakukan oleh Kemenhub dalam rangka menanamkan budaya berlalu lintas yang baik kepada masyarakat sejak usia dini. "Kita sering berhasil menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak yang masih TK atau SD. Mereka malah bisa menjadi pengingat, misalnya kita sebagai orang tua melanggar rambu-rambu lalu lintas," tuturnya.

Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat terus berkomitmen untuk melakukan gerakan sadar berlalu lintas sejak usia dini, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan dan menekan angka kecelakaan lalu lintas yang masih tinggi, dengan faktor penyebab tertinggi yaitu akibat kesalahan manusia (*human error*).

Kemenhub memiliki sebuah program pengenalan dan

pembelajaran cara berlalu lintas untuk anak-anak usia dini, bekerja sama dengan guru-guru sekolah yang membidangi pendidikan TK dan PAUD. Pada kegiatan yang berlangsung di UGM ini, dilakukan sejumlah kegiatan edukasi berupa lomba mewarnai rambu dan simbol lalu lintas, serta bernyanyi bersama lagu anak-anak tentang lalu lintas.

Data Korlantas Polri menyebutkan, setiap jamnya dua orang meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Di Indonesia pada tahun 2021, tercatat ada 103.645 kejadian kecelakaan yang mengakibatkan 25.266 korban meninggal dunia, 10.553 korban luka berat, dan 117.913 korban luka ringan. Korban kecelakaan didominasi oleh usia produktif antara 20-49 tahun.

Selain menggelar edukasi keselamatan berlalu lintas kepada anak-anak dan masyarakat

umum, di tempat yang sama, juga digelar pameran kendaraan listrik. Pameran ini dilakukan dalam rangka mengedukasi masyarakat tentang penggunaan kendaraan ramah lingkungan sebagai kendaraan masa depan. Mengingat, semakin tingginya penggunaan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak atau fosil menyebabkan polusi udara dan perubahan iklim yang dapat membahayakan kelangsungan kehidupan manusia.

Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi dan jajaran akademisi UGM. Peserta dalam kegiatan ini yaitu para siswa TK dan SD, para mahasiswa UGM, dan sejumlah perusahaan kendaraan listrik baik itu bus, mobil, sepeda motor dan sepeda.(*)



WASPADADA MOTOR MATIC DI JALAN MENURUN

Oleh: **Djoko Setijowarno**



KNKT telah mengimbau masyarakat agar tidak terlalu memaksakan kendaraannya, gunakanlah kendaraan sesuai dengan fungsi dan kemampuan yang dimiliki pada setiap masing-masing kendaraan, berkendara dengan baik adalah kunci utama keselamatan.

Desember 2019, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) melakukan *survey* peningkatan keselamatan pengguna jalan dan pencegahan kecelakaan pada ruas jalan Bandungsari – Salem (Gunung Lio), Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil *survey* itu seringkali terjadi kecelakaan sepeda motor yang mayoritas dialami oleh sepeda motor bertransmisi otomatis dan *engine brake* kurang optimal dalam mengurangi kecepatan saat kendaraan melintasi turunan panjang.

Hasil *survey* KNKT tahun 2020 menyebutkan, selama kurang lebih satu tahun telah terjadi kecelakaan sepeda motor pada ruas jalan Bandungsari – Salem (Gunung Lio) mengakibatkan 13 orang meninggal dunia dan 95 persen di antaranya menggunakan motor *matic*.

Fenomena kecelakaan pada jalan menurun tajam tersebut yang terjadi pada ruas jalan Bandungsari – Salem (Gunung Lio) Bumiayu, juga terjadi di beberapa tempat lainnya. Kecelakaan sepeda motor khususnya sepeda motor dengan transmisi otomatis seringkali terjadi di beberapa lokasi di Jawa Timur, seperti di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Probolinggo; Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Ijen, Banyuwangi; Pendakian Gunung Buthak, Malang; Taman Wisata B-29, Lumajang.

Di beberapa tempat tersebut sebenarnya pemerintah daerah setempat telah memasang spanduk berisi larangan menaiki gunung menggunakan motor



Pengendara sepeda motor *matic* ketika melewati turunan tajam perlu memahami teknik pengereman agar terhindar dari bahaya.

matic. Namun pemasangan spanduk tersebut mendapat protes dari masyarakat yang menginginkan bepergian naik turun gunung menggunakan motor *matic*, sehingga spanduk peringatan tersebut akhirnya terpaksa diturunkan.

KNKT telah menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlalu memaksakan kendaraannya, gunakanlah kendaraan sesuai dengan fungsi dan kemampuan yang dimiliki pada setiap masing-masing kendaraan, berkendara dengan baik adalah kunci utama keselamatan.

Perlu diingat, bahwa setiap kendaraan itu memiliki kegunaan yang harus disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari desain atau rancangan masing-masing kendaraan.

Untuk meminimalisir kejadian yang sama terulang lagi. Langkah-langkah yang bisa diambil antara lain perlu diadakannya sosialisasi terkait penggunaan kendaraan sepeda motor bertransmisi otomatis (*safety driving*) oleh kementerian terkait; dan untuk pabrik industri sepeda motor selain memberikan buku manual pemeliharaan kendaraan juga diterbitkan buku panduan keselamatan berkendara (*safety riding*).

Korban kecelakaan lalu lintas Mengutip Lampiran Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan

tahun 2018, WHO menerbitkan *Global Status Report on Road Safety* (GSRRS) yang merupakan alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Dekade Aksi Keselamatan Jalan tahun 2011 - 2020 secara global. Dalam laporan tersebut dinyatakan, bahwa target penurunan jumlah fatalitas akibat kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebesar 50 persen pada tahun 2020 sulit dicapai.

Selain itu, di Indonesia kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan penyebab kematian peringkat pertama bagi kelompok umur anak-anak dan remaja, serta sekitar 50 persen korban meninggal dunia akibat kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengendara sepeda motor.

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia, jumlah korban kecelakaan lalu lintas pada periode tahun 2010 - 2020 berkisar antara 147.798 - 197.560 jiwa. Sedangkan jumlah korban meninggal dunia berkisar antara 23.529 - 32.657 jiwa. Pada tahun 2020 angka kematian mencapai 23.529 jiwa, atau setara dengan tiga jiwa meninggal dunia per jam.

Berdasarkan kategori usia, korban meninggal dunia didominasi usia produktif oleh kategori usia 15-34 tahun dan di posisi kedua adalah kategori usia 35-60 tahun. Dilihat dari sisi ekonomi, hal ini memberikan dampak kerugian yang cukup tinggi, baik

secara makro pada sistem ekonomi nasional maupun secara mikro di tingkat perekonomian keluarga. Semakin tinggi usia produktif meninggal dunia yang kemungkinan besar adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, maka semakin meningkat pula jumlah keluarga yang rentan terhadap kemiskinan.

Tingkat presentasi fatalitas kecelakaan lalu lintas (diolah IRSMS 2021) berdasar kejadian kecelakaan selama tahun 2020, didominasi oleh sepeda motor yaitu sebesar 81 persen, kendaraan beroda empat menempati posisi kedua sebesar 8 persen, kendaraan truk menempati posisi ketiga sebesar 7 persen, kendaraan sepeda menempati posisi keempat, kemudian sisanya, sebesar 2 persen merupakan kendaraan lainnya seperti becak, cikir/delman, bajaj/bemo/bentor, kendaraan alat berat dan kereta api. (*)

Cara Kendalikan Motor Matic Saat Lewati Turunan

Tidak sama dengan motor biasa, mengerem di jalan turunan dengan motor *matic* itu tidak bisa sembarangan. Salah-salah, pengendara bisa terjatuh bersama kendaraannya. Supaya tetap aman melewati jalur turunan ketika mengendarai motor *matic*, simak tips berikut ini!

1. Gas jangan dikosongkan
2. Posisikan empat jari di masing-masing *handle* rem.
3. Prioritaskan rem depan dibanding rem belakang.
4. Jangan lepas *handle* rem sebelum lewati jalan turunan.
5. Gunakan kaki kanan untuk menyeimbangkan. (*)



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi PT. Blue Bird yang menggunakan kendaraan listrik untuk angkutan taksi.

Langkah ini mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon di sektor transportasi dan juga mendukung percepatan implementasi penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBLBB untuk Transportasi Jalan

“Pemerintah mendukung penuh langkah Blue Bird untuk kelangsungan dunia yang lebih baik ke depannya,” jelas Menhub.

Menhub mengatakan, penggunaan kendaraan listrik merupakan upaya mewujudkan transportasi yang berkelanjutan (*sustainable*). Diharapkan, langkah ini dapat mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik yang terintegrasi pada tahun 2030, dan mencapai target *net zero emission* pada tahun 2060.

Menhub berharap, langkah yang dilakukan Blue Bird bisa diikuti

MOBIL LISTRIK UNTUK TAKSI

Penggunaan kendaraan listrik merupakan upaya mewujudkan transportasi yang berkelanjutan (*sustainable*), langkah ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya ekosistem kendaraan listrik.

oleh pelaku usaha lainnya di sektor transportasi, untuk semakin gencar menyokong program percepatan implementasi KBLBB ini.

Menhub sempat menjajal kendaraan listrik Tesla, yang digunakan sebagai angkutan taksi Silver Bird dari Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten menuju Jakarta.

PT Blue Bird Tbk (Bluebird) hari ini mengumumkan komitmennya untuk mewujudkan agenda Visi Berkelanjutan 50/30, yang merupakan gambaran dari strategi Perseroan dalam mengurangi 50% emisi karbon dan buangan operasional di tahun 2030.

Pada tahun 2022 merupakan tahun ke-50 Bluebird melayani industri transportasi darat di Indonesia. Visi Berkelanjutan 50/30 Bluebird hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan akan produk dan layanan transportasi yang berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan yang menyeluruh.

Blue Bird berkomitmen bahwa penerapan konsep keberlanjutan dalam transportasi akan meningkatkan keselamatan, mobilitas, mengurangi biaya dan mengurangi kerusakan lingkungan, yang dapat mendukung terwujudnya mobilitas yang lebih baik. (*)



KEBERADAAN TERMINAL BARANG INTERNASIONAL ENTIKONG

Pembangunan Terminal Barak Internasional (TBI) di PLBN Entikong memakan biaya Rp 140, 49 miliar selama 3 tahun APBN. Telah diresmikan tahun 2019. Operasionalnya terhenti akibat pandemi Covid-19. Sekarang akan mulai beroperasi kembali.

Jarak perjalanan Pontianak – Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong sejauh 243 km ditempuh dalam rentang waktu 4 -5 jam. Jalan yang mulus tidak berlubang sangat membantu kelancaran perjalanan. Kondisi jalan yang mulus dengan lebar 7 meter (2 lajur tanpa median) tersebut membuat kendaraan dapat dipacu dengan laju mencapai 100 km per jam di jalan nasional. Mendekati Kawasan PLBN Entikong terbangun jalan empat lajur dengan median yang masing-masing jalur memiliki dua lajur.

Selama ini yang dikenal dengan PLBN Entikong adalah perjalanan Bus Antar Lintas Batas Negara

(ALBN) yang berangkat dari Terminal Sei Ambawang yang terletak di Kabupaten Kubu Raya menuju Kuching (Serawak, Malaysia) dan Brunei Darussalam.

Melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, yakni PLBN Aruk, PLBN Entikong, PLBN Badau (Provinsi Kalimantan Barat), PLBN Walini, PLBN Mota'ain, PLBN Motamasin (Provinsi Nusa Tenggara Timur) dan PLBN Skouw (Provinsi Papua).

Terminal Barak Internasional (TBI) di PLBN Entikong mulai direncanakan tahun 2015 dengan

survey lokasi. Tahun 2016 mulailah penetapan lokasi, pengadaan lahan dan dokumen teknis pembangunan senilai Rp 9 miliar. Tahun 2017 pembangunan tahap pertama berupa pematangan lahan, pekerjaan struktur Gedung dan jalan senilai Rp 52,99 miliar. Tahun 2018 dilakukan pembangunan tahap kedua berupa pekerjaan infrastruktur kawasan dan pekerjaan bangunan terminal senilai Rp 78, miliar. Total biaya pembangunan yang dibutuhkan hingga selesai Rp 140,49 miliar selama 3 tahun anggaran.

Fasilitas utama TBI Entikong berupa kantor terminal, jembatan timbang, gudang, area peti kemas, bengkel, dan tempat istirahat pengemudi. Disamping itu, masih ada fasilitas penunjang, seperti mushola, area parkir, dan kantin.

Diberikan pula ruang pelayanan ekspor impor, seperti ruang fasilitas pelayanan kepabeanan (bea cukai), ruang pelayanan karantina pertanian, ruang pelayanan karantina ikan, ruang pelayanan imigrasi, ruang pelayanan perbankan, dan beberapa ruang penunjang operasional lainnya. Ada pula bangunan *showcase* sebagai tempat pemajangan barang ekspor/impor berjumlah 12 ruang berukuran luas 9 meter persegi.



Kunjungan Plt. Dirjen Hubdat Cucu Mulyana didampingi Kasubdit Terminal Angkutan Jalan, Ahmadi ZB, dan Kepala BPTD Wil. XIV Kalbar, Syamsuddin ke Terminal Barang Internasional Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, 11/6/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

Luas halaman parkir kendaraan peti kemas 2.128 meter persegi dapat menampung peti kemas untuk ukuran 40 feet sebanyak 24 unit kendaraan dan ukuran 20 feet sebanyak 39 unit kendaraan peti kemas.

Komoditi ekspor melalui TBI Entikong berupa komoditi pertanian, komoditi hewan dan komoditi perikanan. Komoditi pertanian, seperti CPO, buah langsung, arang kayu, bungkil kelapa, buah pisang, lada biji, kelapa bulat, gula merah, tebu, buah jeruk, asam keranji dan aquatic plant. Komoditi hewan, seperti kulit kambing, jangkrik, sarang burung walet, kambing kacang, ulat Hongkong dan daging kuda beku. Sedangkan komoditi perikanan, seperti ikan, udang dogol dan udang waling.

Sementara komoditi impor di PLBN Entikong belum ada, karena belum adanya MOU atau kesepakatan antara Negara Malaysia dan Indonesia mengenai komoditi import yang diperbolehkan melalui perbatasan Tubedu – Entikong.

Operasional Terminal Penumpang Internasional ini dilakukan pihak ketiga. Diharapkan keberadaan TBI Entikong akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), mendorong perekonomian masyarakat di Kawasan perbatasan Kalimantan

Barat, dan dapat menambah lapangan pekerjaan baru.

Telah direncanakan jaringan jalan khusus angkutan barang yang terpisah dengan jalur jalan 4 lajur yang sudah terbangun sekarang ini. Kementerian PUPR akan membangun jaringan jalan tersebut.

Selain telah terbangun terminal barang di PLBN Entikong juga diperlukan terminal penumpang dan fasilitas transportasi umum. Fasilitas transportasi umum yang dibutuhkan adalah adanya layanan angkutan umum Rute PLBN Entikong – Kota Sanggau, Rute PLBN Entikong – Kota Pontianak dan angkutan umum kawasan penunjang di sekitar PLBN Entikong (dua rute).

Keberadaan terminal penumpang untuk memberikan tempat yang nyaman bagi kendaraan yang akan menyeberang mulai jam 05.00 menuju Serawak (Malaysia). Selama ini sejumlah kendaraan itu memarkir kendaraannya di sepanjang jalan masuk menuju gerbang PLBN Entikong sepanjang 1 km - 2 km. Kendaraan mulai antri memarkir di jalan itu mulai jam 03.00, yang didominasi kendaraan pribadi. Namun ada juga sejumlah Bus ALBN yang ikut antri setelah berangkat jam 07.00 dari Terminal ALBN Sei Ambawang.

Untuk sementara waktu sebelum terminal penumpang dibangun, halaman parkir TBI dapat dimanfaatkan untuk parkir sejumlah kendaraan yang akan melintas pagi hari di PLBN Entikong.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap melakukan Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Negara (BMN) berupa Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa yang akan dipergunakan sebagai Mal Pelayanan Publik Pemkab Cilacap, pada Senin (4/4) hari ini.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Marta Hardisarwono dalam sambutannya mengatakan, "Saat ini Pemerintah Republik Indonesia sedang gencar-gencarnya mendorong pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), di mana hal tersebut dilakukan agar BMN ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi negara. Adapun pemanfaatan BMN ini bisa dilakukan melalui skema sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Serah Guna (BSG), Bangun Guna Serah (BGS), Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI), dan pinjam pakai."

Marta menjelaskan bahwa pelaksanaan pemanfaatan BMN melalui sewa, KSP, BGS/BSG, KSPI, dan pinjam pakai dapat dilakukan apabila sudah jelas status kepemilikan asetnya tanpa mengubah status aset yang merujuk pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 115 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN).

Adapun tujuan dilakukan pemanfaatan BMN ini untuk mengoptimalkan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelola atau pengguna barang BMN agar tidak disalahgunakan pemanfaatannya.

"Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang optimal, perlu adanya kreativitas dan tindakan yang masif dalam pengelolaan BMN sehingga

MAL PELAYANAN PUBLIK DI TERMINAL CILACAP

Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa Cilacap akan dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap yaitu sebagai Mal Pelayanan Publik.



Sesditjen Perhubungan Darat Marta Hardisarwono bersama Bupati Cilacap Totto Suwanto Pamuji, usai penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa Cilacap sebagai Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cilacap, 4/4/2022. Foto: HMS DJPD/BYU

masing-masing BMN dapat memberikan kontribusi yang berdampak pada pemasukan negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta manfaat yang sebesar-besarnya bagi institusi dan *stakeholdernya*," tutur Marta.

Di samping itu juga, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berupaya tetap terus mengoptimalkan pemanfaatan BMN, salah

satunya dengan pinjam pakai aset Kementerian Perhubungan yang akan dilaksanakan pada Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa Kabupaten Cilacap yang dimanfaatkan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Cilacap.

"Dengan ini kami berharap ke depannya Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa Kabupaten Cilacap dapat digunakan dengan maksimal untuk tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan maupun Pemerintah Kabupaten Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Marta.

Sementara itu, Bupati Cilacap, Totto Suwanto Pamuji mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Kementerian Perhubungan atas Pinjam Pakai Barang Milik Negara berupa Terminal Tipe A Bangga Mbangun Desa yang digunakan sebagai Mal Pelayanan Publik. (*)



TERMINAL GIWANGAN YOGYAKARTA SEGERA DIREVITALISASI

Demi mengembalikan fungsi terminal serta meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi umum, Kementerian Perhubungan terus berupaya melakukan perbaikan salah satunya dengan melakukan revitalisasi atau perbaikan terminal bus.

Kemenhub akan segera memulai proyek revitalisasi Terminal Tipe A Giwangan di Yogyakarta. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (29/5), saat meninjau Terminal Giwangan, Minggu (29/5).

Menhub mengatakan, di Jawa Tengah telah menyelesaikan revitalisasi di tiga terminal tipe A yaitu : Tirtonadi Solo, Mangkang Semarang, dan Bulupitu Purwokerto. "Sekarang kita akan lakukan di Jogja (Terminal Tipe A Giwangan)," ucapnya.

Menurut Menhub, bangunan eksisting gedung Terminal Giwangan yang ada saat ini sudah cukup megah, dan hanya perlu dilakukan renovasi. "Kita sudah siapkan anggaran untuk bangunan baru, tapi akan kami evaluasi karena bangunannya (eksisting) sudah megah. Kita ingin setiap rupiah yang dikeluarkan, harus menghasilkan layanan yang baik. Kita ingin terminal ini lebih nyaman dan indah," ujar Menhub.

pengelolaan yang lebih tegas. Karena sebelumnya, kios-kios yang ada di kelola oleh pihak ketiga, bukan oleh pengelola terminal. "Jadi masyarakat yang nanti akan menyewa kios, bayarnya bisa ke pemerintah (pengelola terminal), bukan ke pihak lain," tutur Menhub.

Menhub berharap dukungan dari Pemkot Yogyakarta untuk mensukseskan revitalisasi Terminal Giwangan dan juga mengapresiasi ide dari Pemkot untuk memisahkan antara jalur bus pariwisata dengan bus AKAP. "Kami siap berkolaborasi agar terminal ini menjadi simpul transportasi utama pergerakan masyarakat dari dan ke Jogja dan juga menjadi salah satu kunci dari kemajuan dari sektor pariwisata," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Walikota Yogyakarta Sumadi siap mendukung revitalisasi yang akan dilakukan di Terminal

Suasana Terminal Bus Giwangan Yogyakarta, 29/5/2022. Foto: HMS DJPD/CAS



Menhub Budi Karya Sumadi meninjau Terminal Bus Giwangan Yogyakarta, 29/5/2022. Foto : HMS DJPD/CAS.

Giwangan dan akan berkolaborasi secara intensif dengan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. "Kita akan integrasikan anggaran yang berkaitan dengan perawatan dan rehabilitasi terminal," ujarnya.

Sesuai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah

daerah, pengelolaan Terminal Tipe A yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah diserahkan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Untuk itu, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat melakukan revitalisasi sejumlah Terminal Tipe A yang ada di Indonesia sebagai upaya peningkatan pelayanan angkutan jalan dengan fasilitas dan bangunan layaknya bandara. Terminal Giwangan menjadi salah satu proyek percontohan revitalisasi yang dilakukan.

Melalui revitalisasi ini, terminal bus bukan hanya sebagai tempat naik turun penumpang, melainkan juga memiliki fungsi lain (*mixed use*) yaitu menggabungkannya dengan kegiatan perkantoran (*working space*), tempat tinggal, hotel, pusat perbelanjaan, pusat pelayanan masyarakat, dan juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Turut hadir dalam peninjauan, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Direktur Prasarana Transportasi Jalan Popik Montanasyah, dan Kepala BPTD Jateng DIY Eko Agus Susanto.(*).

PROFIL TERMINAL GIWANGAN

Luas Lahan : 58,850 m²
Luas Bangunan : 4576 m²

Fasilitas Utama

Bangunan kantor terminal = 644 m²
Jalur kedatangan bus AKAP dan AKDP = Luas 1016 m², 1 lajur (1 bus besar / lajur)
Jalur pemberangkatan bus AKAP dan AKDP = Luas 1179,75 m² untuk 1 lajur (1 bus besar/ lajur)
Tempat parkir, tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum :
AKAP & AKDP = luas 5176,44 m²
Angkota & Angkudes = luas 1330 m²
Ruang tunggu penumpang dan/ atau pengantar = 920,80 m²
Pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi = 9993,14 m²

Fasilitas Penunjang

Kamar kecil / toilet = 9 tempat
Masjid = 145,5 m²
Kios / warung = 9 ruang (@ 3 x 8 m = 24 m²)
Pos Kesehatan = 1 ruang (@ 8 x 4 m = 3,5 m²)
Ruang informasi dan pengaduan = 1 ruang (@1,5 x 1,5 =2,25 m²)
Ruang keamanan = 1 ruang (@1,5 x 1,5 =2,25 m²)
Fasilitas Lainnya
Ruang Penghijauan = 9993,14 m²

Presiden RI Joko Widodo, Kamis (9/6), meresmikan tiga pelabuhan penyeberangan dan satu unit kapal penyeberangan untuk memperlancar konektivitas antar pulau di Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

Ketiga pelabuhan penyeberangan yaitu Pelabuhan Kaledupa, Tomia, dan Binongko. Sementara satu unit kapal penyeberangan yaitu Kapal KMP Sultan Murhum II. Kapal ro-ro ini akan dioperasikan untuk melayani angkutan penyeberangan perintis rute Kamaru - Kaledupa, Kaledupa - Tomia dan Tomia - Binongko dengan trip empat kali seminggu.

“Kita harapkan dengan beroperasi nya pelabuhan dan kapal ini, aktivitas dan mobilitas masyarakat semakin mudah. Utamanya untuk angkutan barang yang berkaitan dengan sembako dan konektivitas antar pulau di Wakatobi diharapkan semakin baik,” ujar Presiden Jokowi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang turut hadir dalam peresmian mengatakan, pembangunan pelabuhan penyeberangan dan kapal di Wakatobi ini merupakan salah satu wujud negara hadir melalui pembangunan transportasi yang berparadigma Indonesia sentris (pembangunan tidak hanya terpusat di pulau Jawa). “Kita bangun infrastruktur transportasi di pulau kecil dan terluar agar konektivitas bisa berjalan dengan baik,” ucapnya.

“Pembangunan pelabuhan ini menggunakan dana SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) dan kita selesaikan ini dalam waktu dua tahun. Keberadaan pelabuhan ini sangat dibutuhkan untuk melancarkan konektivitas di Wakatobi dan sekitarnya,” ujar Menhub.

Ketiga pelabuhan penyeberangan perintis (Kaledupa, Tomia, Binongko) selesai dibangun pada tahun 2021. Memiliki panjang dermaga



Presiden Joko Widodo meresmikan pelabuhan penyeberangan dan kapal penyeberangan di Wakatobi, 9/6/2022. Foto: HMS DJPD/MAD

dilayani oleh dua kapal yaitu KMP Bahtera Mas II dan KMP Sultan Murhum II. Kedua kapal ini akan melayani lintas penyeberangan di Kabupaten Wakatobi dengan rute Kamaru - Wanci - Kaledupa - Tomia - Binongko PP.

Kemenhub memberikan subsidi sebesar Rp. 17,9 miliar untuk pelayanan kapal penyeberangan di Wakatobi yang dioperasikan oleh PT ASDP Indonesia Ferry. Melalui subsidi tersebut, diharapkan dapat memberikan tarif yang terjangkau bagi masyarakat.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut Staf Utama Bidang Perhubungan Darat dan Konektivitas Budi Setiyadi, Dirut ASDP Ira Puspawati, Direktur Transportasi Sungai Danau dan Penyeberangan (TSDP) Junaidi, Kepala BPTD Wilayah XVIII Sultra Benny Nurdin Yusuf dan Kepala Dinas Perhubungan Wakatobi Haryadin.(*)

PRESIDEN RESMIKAN TIGA PELABUHAN PENYEBERANGAN DAN SATU UNIT KAPAL DI WAKATOB

Kehadiran pelabuhan dan kapal ini sangat dinantikan masyarakat Wakatobi dan sekitarnya. Kami pastikan apa yang dibangun ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Wakatobi.

82 M, kedalaman kolam -5m, kapasitas sandar 1000 GRT, tipe dermaga Dolphin, tipe bongkar muat plengsengan.

Sedangkan, KM Sultan Murhum II merupakan kapal ro-ro yang melayani angkutan penyeberangan perintis rute Kamaru - Kaledupa, Kaledupa - Tomia, Tomia - Binongko. Kapal ini mulai beroperasi pada 2 Mei 2022, dengan 4 kali trip dalam seminggu. Kapal ini

dibangun oleh PT Industri Kapal Indonesia (IKI) sejak September 2020 dan selesai dibangun pada Desember 2021 dengan nilai Rp 39,3 miliar. Kapal ini berbobot 500 GT, memiliki panjang 46,80 m, kecepatan 13 knot, berkapasitas 262 penumpang dan kendaraan 16 truk sedang dan 26 kendaraan kecil.

Menhub berharap, keberadaan pelabuhan dan kapal ini akan



KM Sultan Murhum II melayani angkutan penyeberangan perintis rute Kamaru - Kaledupa, Kaledupa - Tomia, Tomia - Binongko. Foto: MAD

mendukung Wakatobi sebagai salah satu kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan dapat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru di Wakatobi dan sekitarnya. “Kehadiran pelabuhan dan kapal ini sangat dinantikan masyarakat Wakatobi dan sekitarnya. Kami pastikan apa yang dibangun ini dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Wakatobi. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan para turis domestik dan mancanegara untuk menikmati keindahan alam yang ada di Wakatobi,” katanya.

Dengan diresmikannya satu unit kapal, saat ini di Pulau Wakatobi



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendampingi Presiden Joko Widodo ketika meninjau KM Sultan Murhum II pada saat peresmian pelabuhan penyeberangan dan kapal penyeberangan di Wakatobi, 9/6/2022. Foto: BKIP / Daniel Pieterz

Drg. Era, seorang ASN di Kemenhub, Mengajak setiap ASN lainnya berperilaku “CERDIK”. Hasil riset Kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018, dikatakan bahwa Indonesia mengalami kenaikan prevalensi Penyakit Tidak Menular. Bahkan PTM menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. PTM tersebut terdiri dari kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus dan hipertensi.

Peningkatan PTM akan berakibat buruk pada pertumbuhan ekonomi dan produktivitas negara. Sebab dalam penanganannya membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama. Menurut data dari buku profil Kesehatan Indonesia 2020 disebutkan bahwa ada 4 jumlah kasus terbesar yaitu Jantung (11,6 juta), Kanker (2,3 juta), Stroke (1,8 juta) dan Gagal ginjal (1,6 juta). Dan total biaya yang dikeluarkan lebih dari 15,5 T. Angka ini belum termasuk dengan ratusan triliun biaya untuk program PEN akibat pandemi covid-19 lalu.

Dr. Imran Agus Sp.KO adalah Direktur Promkes dan Pemberdayaan Masyarakat, Ditjen Kesmas, Kementerian Kesehatan RI. Dia mengatakan bahwa kerugian ekonomi akibat konsumsi tembakau, baik langsung maupun tidak langsung, mencapai hampir Rp 532 triliun. Melalui data dari Tobacco Atlas tahun 2020, Indonesia adalah negara ketiga tertinggi di dunia dalam hal jumlah perokoknya, setelah China dan India.

Melihat potensi kerugian dan biaya yang besar dalam mengatasi kasus PTM, salah satu hal yang dapat dilakukan oleh ASN adalah berperilaku “cerdik”. “CERDIK” merupakan singkatan dari Cek Kesehatan berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress. Dengan menjadi ASN yang



Bersepeda adalah sebuah aktivitas fisik yang tidak semata-mata olahraga namun juga mengandung unsur rekreasi yang dapat membantu mengelola stress. Foto : BKIP

MENJADI ASN YANG CERDIK

“cerdik” maka dapat mengurangi faktor resiko PTM. Sehingga biaya negara pun menjadi berkurang dalam mengatasi kasus PTM.

Pekerjaan yang banyak menghabiskan waktu dengan duduk di bangku, pekerjaan yang memiliki tingkat stress tinggi, lingkungan istirahat di kantor yang banyak asap rokok, memakan makanan dengan kalori berlebihan dan sering lupanya cek Kesehatan berkala cenderung identik dengan pekerjaan seorang ASN. Jurnal Lancet tahun 2012 lalu menyebutkan bahwa “*sitting is the new smoking*”, yang berarti bahwa terlalu banyak duduk atau kurang bergerak sama mematakannya dengan merokok. Jika satu batang rokok bisa menurunkan usia harapan hidup hingga 11 menit, maka duduk selama dua jam disebut dapat menurunkan usia harapan hidup hingga 22 menit.

WHO tahun 2013 mengatakan bahwa dengan mengkonsumsi

makanan tinggi serat, olahraga yang cukup dan tidak merokok dapat mencegah 80% penyakit jantung dan 33% penyakit kanker. Kementerian Kesehatan melalui Ditjend Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mengajak masyarakat untuk berperilaku “Cerdik”.

Drg. Era yang pernah bertugas di beberapa Rumah sakit, Klinik dan Puskesmas, yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia, menyebutkan bahwa perilaku “cerdik” ini dimasukkan ke dalam program Promkes. Promosi Kesehatan (Promkes) merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam memberikan pemahaman serta kemampuan agar mampu menjaga status Kesehatan pada dirinya sendiri. PTM dapat terjadi cenderung karena gaya hidup, minimnya pengetahuan dan kesadaran dalam menjaga Kesehatan. Oleh karena itu Promosi Kesehatan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Dan ajakan drg. Era untuk menjadi ASN yang “CERDIK” perlu dipertimbangkan untuk diikuti kita semua. (*)

“CERDIK” merupakan singkatan dari Cek Kesehatan berkala, Enyahkan asap rokok, Rajin aktivitas fisik, Diet sehat dengan kalori seimbang, Istirahat yang cukup, dan Kelola stress.

UMUM

WUJUDKAN ZONA INTEGRITAS, DIRJEN HUBDAT MINTA TINGKATKAN KOMITMEN DAN KINERJA



Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) mewujudkan keberlanjutan zona integritas (ZI) sebagai bentuk nyata komitmen seluruh pimpinan dan pegawai. Hal ini dilakukan melalui kegiatan Pencanangan Kembali Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Ditjen Hubdat yang digelar pada Selasa (24/05) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB/ Jembatan Timbang) Cekik, Bali.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi yang hadir pada acara itu menjelaskan bahwa, “Kegiatan hari ini merupakan komitmen Pemerintah khususnya Ditjen Perhubungan Darat. Sejak tahun 2017 kami mengelola Jembatan Timbang, belum pernah kami dengar ada penyimpangan yang dilakukan oleh Korsatpel kami, namun saat ini banyak persepsi masyarakat yang kurang baik tentang Jembatan Timbang,” jelas Dirjen Budi.

Masih adanya pemikiran masyarakat umum akan citra Jembatan Timbang yang sering terjadi pungli seharusnya dapat meningkatkan integritas setiap petugas di Ditjen Hubdat agar dapat dibuktikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi pungutan liar. “Apa yang kita lakukan hari ini diharapkan tidak hanya pencanangan saja tapi juga terefleksi dengan baik dan diimplementasikan secara baik,” jabar Dirjen Budi.

Dirjen Budi melanjutkan bahwa kekeliruan persepsi yang timbul di masyarakat harus dibenahi dan men-

jadi acuan untuk kinerja yang lebih baik lagi. “Seringkali penyimpangan itu yang melakukan bukan dari jembatan timbang, oleh karena itu kami akan terus meminta pendampingan dari kepolisian. Saya juga berterima kasih kepada para Korsatpel dan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang telah bertindak tegas dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari,” tambah Dirjen Budi.

Menurut Dirjen Budi saat ini masih banyak tantangan yang akan dihadapi oleh pihaknya untuk menciptakan Wilayah Bebas Korupsi.

“Saya minta kepada kita semua yang hadir ini untuk memanfaatkan JT sebagai tempat untuk melakukan pengawasan yang benar bagi angkutan barang serta dapat meningkatkan peran pemerintah terutama bagi operator angkutan barang,” ungkapny.

Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Dadan M. Ramdan yang mewakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menjelaskan bahwa Pencanangan ZI di lingkungan Ditjen Hubdat pertama kali telah dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2019 di UPPKB Losarang Indramayu. (*)

LALU LINTAS

DIRJEN HUBDAT TINJAU PROGRES PERBAIKAN JEMBATAN NGAGLIK I LAMONGAN YANG AMBLES



Terhambatnya kelancaran arus lalu lintas yang diakibatkan kerusakan Jembatan Ngaglik I Lamongan yang ambles pada Selasa (29/3) lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan tinjauan progres perbaikan jembatan tersebut pada Sabtu (1/4).

“Berdasarkan hasil pantauan hari ini di Jembatan Ngaglik I Lamongan yang merupakan jalur nasional di mana nantinya digunakan sebagian

masyarakat Jawa Timur tidak hanya untuk sehari-sehari juga hendak mudik ke beberapa daerah sekitarnya. Mengingat potensi pergerakan masyarakat di Jawa Timur sebesar 17,1% persen atau 13,6 juta orang berdasarkan hasil Survei Litbang Perhubungan,” jabar Dirjen Budi.

Dirjen Budi menerangkan bahwa Jembatan Ngaglik I Lamongan ini menjadi salah satu jalur yang dilalui sehingga diperlukan penanganan secara cepat dan tepat. “Pada dasarnya Jembatan Ngaglik I ini menjadi jalur yang sering dilalui masyarakat baik dari Lamongan ke Gresik maupun daerah lainnya, kami (Kemenhub) telah berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya Kementerian PUPR, Kepolisian, maupun Dinas Perhubungan untuk memperbaiki jembatan ini yang direncanakan memakan waktu sebanyak 21 hari di mana sudah berjalan selama 3 hari,” kata Dirjen Budi.

la pun menambahkan, perbaikan Jembatan Ngaglik I Lamongan diharapkan selesai saat H-10 menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. “Ber-

dasarkan informasi yang ada, diharapkan pada H-10 sebelum Lebaran jembatan ini sudah dapat digunakan. Namun sebelum digunakan, kami juga akan melakukan rapat lebih lanjut terkait simulasi karena ada grider yang terpasang di jembatan yang rusak namun level antara jembatan yang baru dengan yang lama agak berbeda sekitar 30 cm,” jelas Dirjen Budi.

Di samping itu, untuk rencana jangka panjangnya Dirjen Budi mengatakan bahwa setelah Lebaran, Kementerian PUPR akan segera memperbaiki jalan di sekitar jembatan tersebut agar level jalannya sama. “Untuk saat ini selama jembatan diperbaiki, fokus kami adalah mengatur mobilitas masyarakat, adapun gangguan arus lalu lintas dapat diminimalisir.

Selain itu kami juga sudah berkoordinasi agar nantinya dapat ditindaklanjuti setelah perbaikan jembatan selesai untuk diberikan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat terkait perilaku berkendara agar tidak terulang kejadian serupa,” tutur Dirjen Budi. (*)

SARANA

MENHUB AJAK MANFAATKAN USIA EMAS ANAK UNTUK PENDIDIKAN BERLALU LINTAS YANG BAIK



Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait yang memiliki perhatian terhadap isu keselamatan jalan, memanfaatkan usia emas anak untuk memberi pendidikan tentang bagaimana berlalu lintas yang baik dan berkeselamatan.

Hal ini diungkapkan Menhub saat menjadi pembicara kunci Seminar Nasional

Sadar Lalu Lintas Usia Dini (SALUD) yang diselenggarakan Badan Pengembangan SDM Perhubungan dalam rangka memperingati Dies Natalis Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) ke-51, Kamis (19/5).

Menhub mengatakan, pendidikan sadar berlalu lintas sejak usia dini penting untuk dilakukan sebagai landasan pembangunan karakter manusia yang berkeselamatan dalam bertransportasi. Diharapkan, anak-anak dapat memahami apa arti berlalu lintas yang baik dan memberikan contoh kepada orang-orang terdekatnya bahkan ke orang yang lebih dewasa. “Pendidikan SALUD memanfaatkan masa emas anak-anak dengan harapan dapat memberikan pengalaman yang membekas di hatinya dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas, membutuhkan suatu gerakan sadar berlalu lintas sejak usia dini

yang dilakukan dengan format yang menarik dan dilakukan secara konsisten.

Oleh karenanya, Menhub mengajak pemangku kepentingan terkait seperti: Kemendikbud Ristek, Kepolisian, pemerintah daerah, akademisi, dan pemerhati anak untuk berkolaborasi meningkatkan metode pendidikan SALUD dengan format yang menarik. “Kita bisa menggunakan cara-cara yang mengakar pada budaya dan kearifan bangsa Indonesia yang beragam, sehingga memiliki kedalaman dan dapat diterima dengan mudah bagi anak-anak” ucapnya.

Menhub mengungkapkan, membangun kesadaran akan keselamatan kepada masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah. “Kita sudah buat aturan tetapi kadang sulit diterima masyarakat. Tetapi pada masa mudik lalu kami bersama Korlantas Polri terbukti bisa melakukan edukasi dan masyarakat mau mengikuti anjuran pemerintah. Artinya, kolaborasi harus terus dilakukan karena tidak mungkin satu sektor bisa menyelesaikannya sendiri,” tutur Menhub. (*)

Menurut Dirjen Budi, kehadiran kapal yang diberi nama KMP. Bahtera Nusantara 03 ini di wilayah Batam dapat mempermudah mobilitas masyarakat yang akan menyeberang serta membuka akses yang lebih luas bahkan hingga ke wilayah di sekitar Batam.

“Batam yang berhadapan langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura juga merupakan prioritas kami untuk memperhatikan pembangunan sarana dan prasarana transportasinya. Dari yang disampaikan Bapak Presiden itu maka kami di Ditjen Hubdat secara bertahap sudah mewujudkan semuanya. Kita bangun kapal dan dermaga di sini cukup banyak. Jadi semuanya ini tidak tiba-tiba, mudah-mudahan *multiplier effect* dari pembangunan kapal ini akan dirasakan masyarakat,” jelas Dirjen Budi.

Adapun spesifikasi teknis KMP. Bahtera Nusantara 03 ini yaitu panjang keseluruhan 71,92 m, lebar: 14 m, tinggi: 4,6 m, kecepatan dinas: 15 knot. Kapal ini mampu mengangkut penumpang sebanyak 386 orang dan ABK 24 orang, serta kendaraan 14 unit truk besar, 12 unit truk sedang, dan 10 unit kendaraan roda 4. (*)

“Kita akan menyiapkan sarana prasarana bagi kapal, karena ini adalah amanat bapak Presiden bahwa kita harus menyiapkan sarana prasarana untuk daerah 3 TP (tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan),” ungkap Dirjen Budi.

TSDP

LAYANI LINTAS DOMPAK-MATAK-PENAGI, DITJEN PERHUBUNGAN DARAT HADIRKAN KMP. BAHTERA NUSANTARA 03 UNTUK MASYARAKAT KEPRI



Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi melakukan peluncuran kapal penyeberangan penumpang Ro-Ro 1500 Gross Ton (GT) yang melayani lintas Dompok-Matak-Penagi di Galangan PT. Karimun Anugrah Sejati (KAS), Batam. Acara ini digelar pada Rabu (18/05) siang.

LALU LINTAS

SIAGA BANTU PEMUDIK DITJEN HUBDAT SEDIAKAN MOBIL PATROLI PELAYANAN MASYARAKAT GRATIS



Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menyediakan sebanyak 11 mobil patroli pelayanan masyarakat gratis guna memberikan pelayanan serta membantu pemudik yang mengalami kesulitan di jalan selama masa penyelenggaraan angkutan lebaran 1443 H.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, “Sebagai bentuk kesiagaan pemerintah dalam mendukung Angkutan Lebaran yang aman dan sehat, Ditjen Perhubungan Darat menyediakan 11 mobil patroli pelayanan masyarakat yang tidak dikenakan biaya sepeserpun dilengkapi dengan peralatan penunjang kendaraan disertai juga tim kompeten yang akan membantu.”

Peralatan penunjang yang disediakan dalam mobil patroli pelayanan berupa Bahan Bakar Minyak (BBM), kunci-kunci, kabel jumper atau sling, dongkrak, makanan, serta minuman kemasan.

Tim Ditjen Hubdat terdiri dari 4 tim dengan empat rute yakni Lintasan Karawang-Subang, Lintasan Indramayu-Cirebon, Lintasan Brebes-Pemalang, dan Lintasan Pekalongan-Semarang.

Sedangkan BPTJ terdiri dari 2 tim dengan rute Lintasan Jakarta-Bekasi dan Lintasan Jakarta-Tangerang, BPTD Jabar terdiri dari 2 tim dengan rute Lintasan Purwakarta-Bandung (Nagrek) dan Lintasan Limbang-Banjar, BPTD Jateng-DIY terdiri dari 2 tim dengan rute Lintasan Semarang-Yogyakarta dan Lintasan Pejagan-Yogyakarta, dan BPTD Banten terdiri dari satu tim untuk Lintasan Serang-Merak.

Dengan disediakannya mobil patroli pelayanan dapat melayani masyarakat yang melakukan perjalanan mudik dengan baik, selamat, aman, dan nyaman. (*)

ANGKUTAN

CEGAH KECELAKAAN, DITJEN HUBDAT TINGKATKAN PENGAWASAN ANGKUTAN PARIWISATA



Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan meningkatkan pengawasan angkutan pariwisata.

“Seiring dengan maraknya kecelakaan lalu lintas khususnya bus pariwisata, kami di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menambah pengawasan bagi bus baik AKAP maupun Pariwisata. Terlebih baru pada Minggu (26/06) lalu terjadi kecelakaan beruntun di Tol Purbaleunyi KM 92 arah Jakarta, kami turut prihatin atas kejadian tersebut,” demikian disampaikan oleh Direktur Angkutan Jalan, Suharto pada Kamis (30/06).

Dalam keterangannya, Suharto menyatakan bahwa pihaknya bersama-sama dengan Pemda akan mengawasi operasional angkutan Pariwisata termasuk kehadiran bus dan awak bus pada obyek wisata.

HUMAS

SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022



Pada tanggal 27-29 Juni 2022, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat mengadakan kegiatan rutin Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Ditjen Hubdat yang diselenggarakan di Yogyakarta.

Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik ini mengusung

“Kami bersama dengan Pemerintah Daerah akan melakukan sejumlah upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas bagi angkutan bus, salah satunya dengan kampanye keselamatan transportasi. Sasaran kampanye keselamatan kami ini yaitu untuk para operator bus maupun pengemudi,” tambah Suharto.

Selain itu ia menjelaskan bahwa dengan kehadiran SPIONAM (Sistem Perizinan Online Angkutan dan Multimoda) diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk memeriksa validitas angkutan umum yang akan digunakan apakah sudah terdaftar atau belum. Dalam SPIONAM tersebut dicantumkan kapan masa berlaku uji kendaraan juga masa berlaku kartu pengawasan kendaraan tertentu.

“Dengan menggunakan SPIONAM maka pengawasan terhadap pelayanan angkutan pariwisata juga secara tidak langsung dilakukan oleh masyarakat dan ini diyakini akan lebih efektif karena masyarakat juga sebagai pengguna angkutan pariwisata, saat ini sudah memasuki tahapan darurat keselamatan sehingga dalam waktu dekat kami akan membuat MoU sebagai komitmen bersama dari pemangku kepentingan seperti Kemenhub, Kementerian PUPR, Kemenparekraf, dan Korlantas Polri. Institusi ini akan bekerja sesuai tupoksinya masing-masing dalam kurun waktu dan obyek yang sama,” pungkas Suharto. (*)

tema “Menjadi Humas yang Adaptif di Era Disrupsi Digital”. Sehingga diharapkan para peserta nantinya dapat memahami materi seputar Keterbukaan Informasi Publik serta dapat mengaplikasikan pengetahuan mengenai Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

Adapun yang menjadi peserta pada kegiatan sosialisasi ini adalah seluruh unit kerja dan UPT di lingkungan Ditjen Hubdat. Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang mumpuni dibidangnya antara lain Komisioner Komisi Informasi Publik, Tenaga Ahli KIP, Tenaga Ahli Menhub Bidang Komunikasi dan Media Massa, serta Professional Broadcaster.

Melalui rangkaian sosialisasi selama 2 hari tersebut kiranya setiap peserta dapat memaksimalkan kapasitas dan kemampuannya selama sosialisasi dan pelatihan yang kemudian akan diaplikasikan di unit kerja masing-masing. (*)



Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Junaidi bersama jajaran meninjau Pelabuhan Penyeberangan Jangkar, Situbondo, Jawa Timur, 13/6/2022. Foto: BPTD Jatim

KEMENHUB – PT. ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO) SOSIALISASIKAN RENCANA PENGOPERASIAN LINTAS JANGKAR-LEMBAR DAN JANGKAR-KUPANG

Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Junaidi menyampaikan bahwa dengan kehadiran lintas Jangkar-Lembar dan Jangkar-Kupang akan membantu konektivitas daerah dan menghubungkan Jangkar, Kabupaten Situbondo dengan Lembar, Kabupaten Lombok Barat dan Bolok, Kabupaten Kupang. Hal tersebut disampaikan pada Sosialisasi KM 85 Tahun 2022 dan KM 88 Tahun 2022 Pada lintas Penyeberangan Jangkar-Lembar di Banyuwangi pada Senin (13/06).

Bahwa lintas penyeberangan Jangkar - Lembar dan Jangkar - Kupang telah diputuskan melalui Keputusan Menteri No. KM 85 Tahun 2022 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Antar-provinsi pada Pelabuhan Jangkar di Kabupaten Situbondo Jawa Timur, sedangkan untuk tarif lintas Jangkar Lembar dan Jangkar telah ditetapkan sesuai Keputusan Menteri Nomor KM 88 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas KM 92 Tahun 2020 Tentang Tarif Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Kelas Ekonomi Lintas Antar-provinsi.

“Kedua lintas penyeberangan ini dibuka dengan tujuan mempermudah distribusi logistik dari Jawa ke Nusa Tenggara dan untuk meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian di wilayah Situbondo. Selain itu, kedua lintas tersebut diharapkan dapat menjadi alternatif penyeberangan yang dapat mengurangi beban jalan dan kemacetan di daerah Banyuwangi, mengurangi kepadatan arus lalu lintas kendaraan di Pelabuhan Ketapang,” jabar Junaidi.

Dalam mempersiapkan pengoperasian kedua lintas tersebut, Ditjen Hubdat telah menyelenggarakan beberapa kali rapat pembahasan yang melibatkan para

pemangku kepentingan terkait, seperti Pemda Jawa Timur, Pemda Kabupaten Situbondo, Kepala KSOP setempat, PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), Asosiasi, dan operator angkutan penyeberangan.

PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) dan Bupati Situbondo sebelumnya telah melakukan perjanjian kerjasama MoU pada hari Jum'at, 3 Juni 2022 yang lalu.

Beberapa permasalahan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemprov dan Pemda yaitu terkait kesiapan secara teknis aspek keselamatan operasional, akses masuk pelabuhan dan zonasi serta alur *traffic* kendaraan dari dan ke pelabuhan terlebih dahulu harus diselesaikan dengan berkoordinasi dengan PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero), KSOP, Distrik Navigasi dan stakeholder terkait untuk memastikan kesiapan operasional dan persiapan pelayaran perdana.

“Dalam rapat pembahasan tersebut kita bersama-sama telah memetakan beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam pengoperasian lintas serta menyusun rencana teknis operasional lintas. Berdasarkan hasil pemetaan, beberapa kendala telah berhasil diatasi secara bertahap, khususnya terkait aspek hukum dan kesiapan prasarana. Kedua Keputusan Menteri tersebut merupakan dasar hukum yang sangat krusial bagi pengoperasian lintas Jangkar - Lembar dan Jangkar - Kupang,” lanjut Junaidi.

Sementara itu, terkait kesiapan prasarana jalan, seperti akses jalan dari dan menuju pelabuhan, Pemda Jawa Timur dan Pemda Situbondo telah menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan proses perbaikan, peningkatan, dan penyediaan berbagai fasilitas yang diharapkan dapat memberikan kenyamanan,

keamanan dan keselamatan kepada para pengguna jasa.

“Kami sangat mengapresiasi dan menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada para pihak yang terlibat dalam proses penyiapan operasional lintas Jangkar-Lembar dan Jangkar-Kupang,” ucapnya lagi.

Junaidi menjelaskan bahwa agar segera terwujud layanan penyeberangan di lintas Jangkar-Lembar dan Jangkar-Kupang, maka sangat diperlukan partisipasi dari para operator, khususnya para operator yang mengoperasikan kapal dari lintas Ketapang-Gilimanuk, Padang bai - Lembar dan Merak - Bakauheni. “Kriteria kapal yang dapat beroperasi di lintas Jangkar-Lembar dan Jangkar-Kupang telah ditetapkan,” lanjutnya.

Penetapan Zonasi di Pelabuhan

Sementara itu di hari yang sama, dilakukan juga sosialisasi mengenai penetapan zonasi di kawasan pelabuhan penyeberangan.

Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 91 Tahun 2021 tentang Zonasi di Kawasan Pelabuhan yang Digunakan untuk Melayani Angkutan Penyeberangan, zonasi di Pelabuhan dibagi menjadi 5 (lima) zonasi, yaitu :

1. Zonasi A : digunakan untuk mengatur pergerakan orang;
2. Zonasi B : digunakan untuk mengatur pergerakan kendaraan;
3. Zonasi C : digunakan untuk mengatur fasilitas vital;
4. Zonasi D : digunakan untuk daerah khusus terbatas, seperti perkantoran dan area komersil di dalam kawasan pelabuhan;
5. Zonasi E : digunakan sebagai area parkir untuk antrian Kendaraan yang sudah memiliki tiket namun belum waktunya untuk masuk Pelabuhan Penyeberangan.

Atas terselenggaranya sosialisasi ini, Junaidi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero). Ke depannya diharapkan dapat saling memberi masukan dan diskusi. “Kami berharap melalui kegiatan ini dapat dijadikan sebagai upaya perbaikan tata kelola perbaikan pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan di Indonesia. Selain itu, kita dapat saling memperkuat peran dan fungsi dalam peningkatan pelayanan dalam penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan,” pungkasnya.(*)



Kunjungan Dirjen Hubdat Budi Setiyadi dalam rangka inspeksi keselamatan LLAJ ke Terminal Bus Kalideres Jakarta, 11/4/2022. Foto: HMS DJPD/MAD



Direktur Sarana Transportasi Jalan Danto Restyawan (bawah) menjadi narasumber pada Focus Group Discussion Mitigasi Risiko Kecelakaan Angkutan AKAP, AKDP, dan Pariwisata pada momen Lebaran tahun 2022, Yogyakarta, 14/4/2022. Foto : HMS DJPD/CAS



► Kemenhub bersama Kemen PUPR dan Korlantas Polri melakukan Penandatanganan Surat Keputusan Bersama terkait Pengaturan Lalu Lintas selama Angkutan Lebaran Tahun 2022, Jakarta, 13/4/2022. Foto : HMS DJPD/BYU



▲ Menhub Budi Karya Sumadi dan Menko PMK Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tingkat Nasional, Jakarta, 1/4/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



◀ Pembukaan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2022, Jakarta, 25/4/2022. Foto: HMS DJPD/BYU - BKIP/DIB



▲ Dirjen Hubdat Budi Setiyadi mendampingi Menhub Budi Karya Sumadi melakukan pantauan arus mudik di GT Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, 1/5/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



◀ Peresmian Revitalisasi Terminal Bus Mangkang Semarang, dan Pelepasan Balik Rantau, Semarang, Jawa Tengah, 7/5/2022. Foto: HMS DJPD/BYU - CAS



◀ Dirjen Hubdat Budi Setiyadi bersama jajaran melakukan kegiatan *Safety Riding* dari Tegal ke Purwokerto, Jawa Tengah, 26/5/2022. Foto: HMS DJPD/WBW

► Penghargaan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Tahun 2022 (1443 H), Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, 27/6/2022. Foto: HMS DJPD/WBW



► Plt. Dirjen Perhubungan Darat Cucu Mulyana bersama jajaran melakukan peninjauan prasarana transportasi darat di Kalimantan Barat, 11/6/2022. Foto: HMS DJPD/BYU



► Presiden Joko Widodo meresmikan tiga pelabuhan penyeberangan dan satu kapal motor penumpang (KMP) di Dermaga Rakyat Wanci, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 9 Juni 2022. Foto: HMS DJPD/MAD

